

**STUDI KOMPARASI PENERAPAN SIGAP DALAM
PENINGKATAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI
GAMPONG PEUNYEURAT DAN GAMPONG KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
NABILLA FEBRIDHA
NIM. 210802035**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Febridha
NIM : 210802035
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 11 Februari 2003
Alamat : Gp. Lamgeu-Eu, Kec Peukan Bada, Aceh
Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

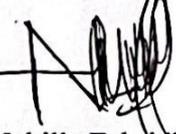
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi atau pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Yang Menyatakan



Nabilla Febridha
210802035

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**STUDI KOMPARASI PENERAPAN SIGAP DALAM
PENINGKATAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI
GAMPONG PEUNYEURAT DAN GAMPONG KUTA ALAM
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

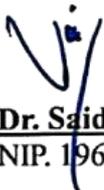
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:
NABILLA FEBRIDHA
NIM. 210802035

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Sa'id Amirul Kamar, M.M., M. Si
NIP. 19611005 1982031007

Pembimbing II,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIP. 19901119 2022031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

**STUDI KOMPARASI PENERAPAN SIGAP DALAM
PENINGKATAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI
GAMPONG PEUNYEURAT DAN GAMPONG KUTAALAM
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

NABILLA FEBRIDHA
NIM. 210802035

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

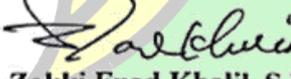
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025 M
23 Rajab 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Saïd Amirul Kamar, M.M., M.Si
NIP. 19611005 1982031007

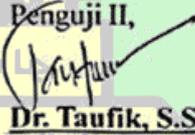
Sekretaris,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIP. 19901119 2022031001

Penguji I,


Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 19780203 2005041001

Penguji II,


Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19890518 2023211032

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271 1999031005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Shalawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: **“Studi Komparasi Penerapan Sigap Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik Di Gampong Peunyeurat Dan Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Said Amirul Kamar, M.M., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran, masukan serta motivasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

6. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. selaku pembimbing II yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
 8. Teristimewa Bapak dan Mamak yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan secara moral maupun materil dan ribuan doa dalam sujud yang diberikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 9. Abang Muhammad Afdhal, yang selalu menemani penulis pada hari yang tak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluhan kesah, memberikan dukungan, semangat, tenaga dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Sahabat tersayang 'Maisya Aualiadhana' yang selalu ada saat sedih dan senang, yang telah membantu peneliti dan berjuang bersama, tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta semangat selama proses menyelesaikan skripsi ini.
 11. Teman-teman baik dalam kampus maupun luar kampus, yang telah memberikan dukungan serta semangat selama proses menyelesaikan skripsi ini.
 12. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2021 yang telah berjuang bersama-sama dalam proses meraih gelar sarjana.
- Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 17 Januari 2025



Nabilla Febridha
210802035

ABSTRAK

Transparansi informasi publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif. Penerapan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan studi komparatif yang membandingkan penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gampong Peunyeurat lebih optimal dalam menerapkan SIGAP dibandingkan dengan Gampong Kuta Alam, dilihat dengan pemutakhiran data yang lebih terstruktur, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, serta aksesibilitas informasi yang lebih baik. Sementara itu, Gampong Kuta Alam masih menghadapi kendala dalam pengelolaan sistem, sehingga transparansi informasi dalam penerapan SIGAP belum sepenuhnya maksimal. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas penerapan SIGAP meliputi dukungan kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta tingkat literasi digital masyarakat. Dengan adanya SIGAP, diharapkan transparansi informasi publik di tingkat gampong dapat semakin meningkat serta menjadi referensi bagi gampong lain dalam mengembangkan sistem informasi yang lebih efektif. Peningkatan pelatihan bagi perangkat gampong dan masyarakat, serta optimalisasi infrastruktur teknologi, menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar SIGAP dapat berfungsi secara maksimal.

Kata Kunci: *SIGAP, Transparansi, Gampong, Informasi Publik, Pelayanan.*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH Error! Bookmark not defined. | |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Landasan Teori | 7 |
| 2.1.1 Teori Komparasi | 7 |
| 2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan | 8 |
| 2.1.3 Teori Transparansi | 12 |
| 2.1.4 Teori Strategi Kebijakan..... | 16 |
| 2.1.5 SIGAP (Sistem Informasi Gampong) | 18 |
| 2.1.6 Teori E-Governance | 20 |
| 2.1.7 Teori Sistem Informasi | 22 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 23 |
| 2.3 Kerangka Berfikir | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 27 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 29 |
| 3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian..... | 30 |
| 3.4 Sumber Data..... | 30 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| 3.6 Informan Penelitian..... | 32 |
| 3.7 Teknik Keabsahan Data | 32 |
| 3.8 Teknik Analisis Data | 33 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 35 |

| | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 35 |
| 4.1.1 | Gampong Peunyeurat | 36 |
| 4.1.2 | Gampong Kuta Alam..... | 37 |
| 4.2 | Hasil Penelitian | 39 |
| 4.2.1 | Mekanisme Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik di Gampong Peunyeurat..... | 39 |
| 4.2.2 | Mekanisme Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik di Gampong Kuta Alam | 48 |
| 4.2.3 | Strategi Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik Di Gampong Peunyeurat | 57 |
| 4.2.4 | Strategi Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik Di Gampong Kuta Alam..... | 65 |
| 4.3 | Pembahasan..... | 70 |
| 4.3.1 | Analisis Perbandingan Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik di Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam | 70 |
| BAB V | PENUTUP | 74 |
| 5.1 | Kesimpulan | 74 |
| 5.2 | Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 76 |
| LAMPIRAN | | 79 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | | 84 |



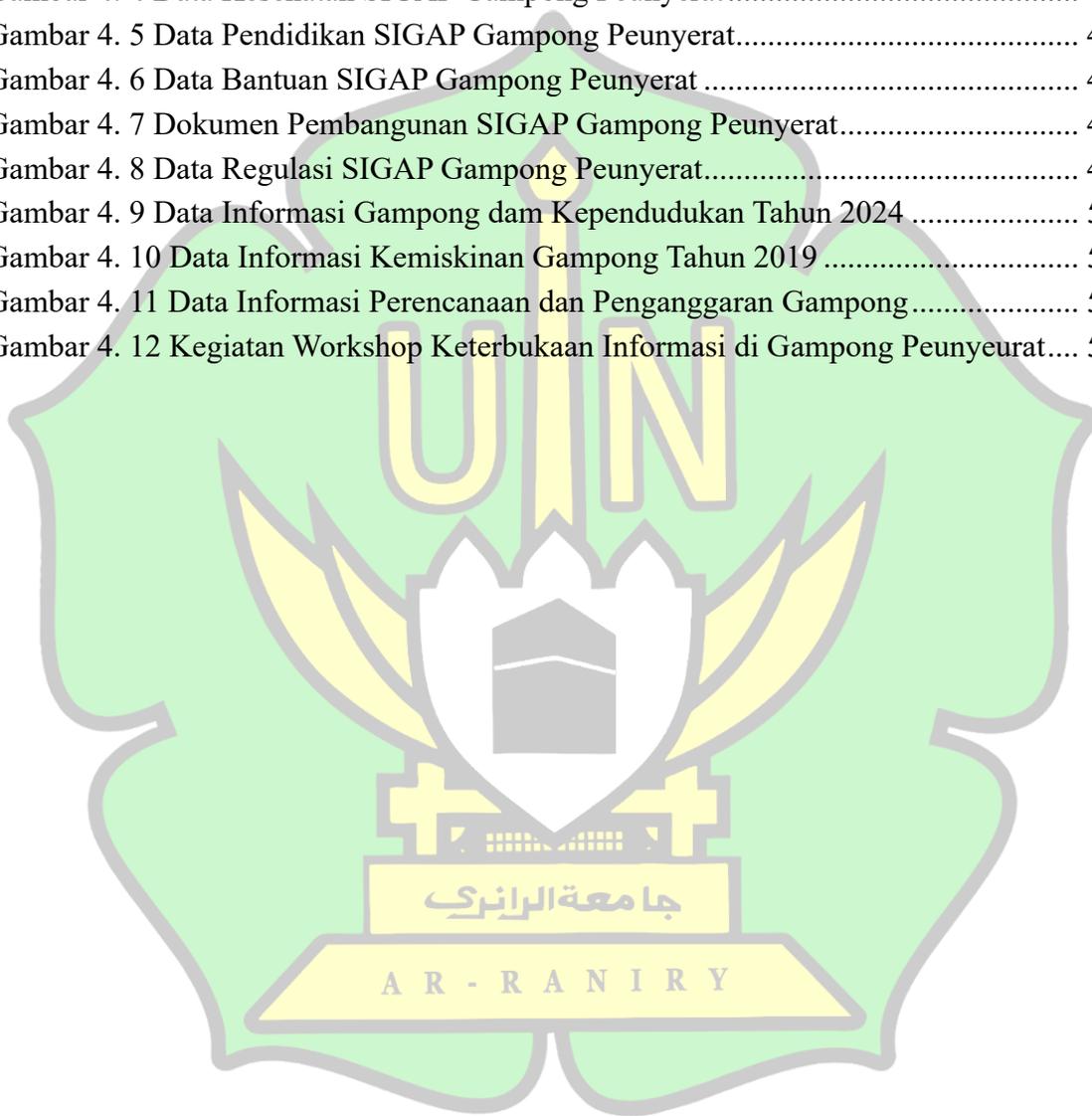
DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 Dimensi, Indikator dan sumber, Mekanisme Penerapan SIGAP | 29 |
| Tabel 3.2 Dimensi, Indikator dan Sumber Strategi Penerapan SIGAP | 29 |
| Tabel 3.3 Daftar Informan Penelitian | 32 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4. 1 Letak Geografis Gampong Peunyeurat..... | 37 |
| Gambar 4. 2 Letak Geografis Gampong Kuta Alam | 39 |
| Gambar 4. 3 Data Penduduk SIGAP Gampong Peunyerat..... | 40 |
| Gambar 4. 4 Data Kesehatan SIGAP Gampong Peunyerat..... | 41 |
| Gambar 4. 5 Data Pendidikan SIGAP Gampong Peunyerat..... | 41 |
| Gambar 4. 6 Data Bantuan SIGAP Gampong Peunyerat | 42 |
| Gambar 4. 7 Dokumen Pembangunan SIGAP Gampong Peunyerat..... | 42 |
| Gambar 4. 8 Data Regulasi SIGAP Gampong Peunyerat..... | 43 |
| Gambar 4. 9 Data Informasi Gampong dan Kependudukan Tahun 2024 | 50 |
| Gambar 4. 10 Data Informasi Kemiskinan Gampong Tahun 2019 | 51 |
| Gambar 4. 11 Data Informasi Perencanaan dan Penganggaran Gampong..... | 51 |
| Gambar 4. 12 Kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi di Gampong Peunyeurat.... | 58 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi dalam pemerintahan harus dijunjung tinggi sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap individu berhak mendapatkan informasi publik, dan pemerintah wajib menjalankan program transparansi. Di era digital, teknologi informasi mempengaruhi sistem informasi desa yang semakin berkembang. Pemerintah turut mengembangkan sistem ini dengan terlibat dalam pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi, sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Platform diperlukan untuk mengelola data seperti kependudukan, kemiskinan, potensi desa, dan informasi publik desa, yang juga diperlukan oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk pembangunan desa yang komprehensif¹.

Dalam rangka membangun Aceh sesuai visi dan misi pemerintah terpilih, diperlukan banyak sarana pendukung, salah satunya adalah Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sebagai perwujudan dari pencapaian program unggulan Pemerintah Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu) yang merupakan instrumen terkini berbasis web, yang mentransformasikan proses konvensional menjadi elektronik. dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 Tentang SIGAP². Website Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, serta didukung oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) mulai dari tahun 2018-2019. Pengembangan website ini merupakan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 86 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib Mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. dan

¹ Abdul Shomad, "Implementasi Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bekasi," *Jurnal AKP*, (2018)

² Pemerintah Aceh, "Sistem Informasi Gampong (SIGAP)," (2021)

merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk menciptakan sistem informasi terintegrasi dari tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi melalui Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT). Gampong dapat memperoleh sistem informasi ini dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) untuk mendapatkan sosialisasi SIGAP³.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Aceh No 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong (SIGAP) menyatakan bahwa SIGAP adalah sistem terintegrasi yang dibangun oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Gampong. SIGAP merupakan kebijakan unggulan yang dikembangkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2018, dengan tujuan utama untuk meningkatkan transparansi informasi publik. Kebijakan ini dirancang agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang akurat dan relevan terkait berbagai program dan aktivitas pemerintah, sehingga mendorong partisipasi publik serta akuntabilitas pemerintahan⁴. Pengembangan dan perluasan penggunaan sistem terus dilakukan oleh DPMG Aceh dan DISKOMINSA Aceh, dengan komitmen untuk meningkatkan fungsi dan manfaat yang akan diperoleh oleh Gampong, untuk digunakan oleh aparatur Gampong di seluruh Aceh guna mengumpulkan data dan informasi terkait pemerintahan dan pembangunan Gampong. Pemerintah gampong dapat memanfaatkan data dan informasi yang tersedia dalam website ini sebagai dasar keterbukaan informasi publik dan pembangunan, perencanaan dan penganggaran tepat sasaran. Sebagian besar Gampong yang telah dilatih operatormya telah menginput data dasar sesuai dengan kondisi Gampong masing-masing. Selain itu, adanya website ini juga dapat menjadi sarana akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan⁵.

Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Gampong, diperlukan alat yang dapat tercipta tata kelola data terintegrasi. Namun, tidak semua permasalahan ini dapat ditangani dengan serius oleh Pemerintah Gampong. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Gampong dalam meningkatkan

³Pemerintah Aceh, “*Sistem Informasi Gampong (SIGAP)*, (2021)

⁴ *Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2021 “Sistem Informasi Gampong,”*

⁵ Bidang KSDATTG, “*Pemerintah Aceh Akan Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Gampong,*” DPMG ACEH, 2021.

transparansi informasi publik masih lemah dan memerlukan perbaikan yang signifikan. Dalam menjalankan program ini tidaklah mudah karena memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap Gampong. Penerapan SIGAP pada Gampong membawa berbagai perubahan positif, mulai dari efisiensi dalam administrasi, peningkatan transparansi lebih tinggi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Informasi mengenai program-program pembangunan, anggaran Gampong, hingga pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat. Melihat aspek implementasi kebijakan, bahwa kebijakan yang baik itu harus dijalankan berdasarkan beberapa faktor, yaitu komunikasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi⁶.

Sebagai contoh, Gampong Peunyeurat dalam menjalankan kebijakan ini, berdasarkan faktor observasi awal, pengelolaan data kependudukan di Gampong Peunyeurat kini lebih tertata rapi dan mudah diakses melalui SIGAP, yang memungkinkan aparatur gampong untuk membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Selain itu, Gampong Kuta Alam juga sudah menjalankan kebijakan ini seperti Gampong Peunyerat. Data penting dan informasi gampong dapat di akses oleh masyarakat publik di *Website* SIGAP Gampong Kuta Alam.

Dengan demikian, SIGAP tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat Gampong, tetapi juga sebagai sarana yang berharga bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam proses pembangunan lokal Gampong.

Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan SIGAP dilihat dari partisipasi aktif warga gampong dalam penerapan dan pemanfaatan sistem informasi ini seperti masyarakat memberikan data atau informasi kepada petugas Gampong terkait data kependudukan. Masyarakat berperan aktif dengan secara sukarela menyampaikan informasi penting, seperti perubahan status keluarga, pindah domisili, atau kelahiran dan kematian, kepada pihak berwenang di tingkat gampong. Ini mencerminkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam mendukung upaya pemerintah untuk menjaga akurasi dan keakuratan data kependudukan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Melalui data yang terkumpul di SIGAP,

⁶ Fahrur Rozi, dkk, "Pengembangan Website Dan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Tulungagung," *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)* 2, no. 2 (2017): 107–12.

perangkat Gampong dapat memahami kebutuhan dan prioritas masyarakat, sehingga program yang dikembangkan lebih relevan dan tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam untuk mengetahui bagaimana penerapan SIGAP serta perbandingan kualitas pelayanan publik dalam penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat dengan Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh, diharapkan dapat ditemukan pola-pola dan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan SIGAP di tingkat Gampong.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Peunyeurat dan Gampong di Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana strategi penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Peunyeurat dan di Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme penerapan SIGAP dalam meningkatkan transparansi informasi publik di Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh.
2. Mengidentifikasi strategi penerapan SIGAP guna meningkatkan transparansi informasi publik di Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh..

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian ilmiah mengenai penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. Temuan ini akan memperkaya literatur yang ada mengenai pengaruh teknologi informasi dalam pemerintahan desa dan memberikan wawasan lebih dalam terkait implementasi sistem informasi di tingkat lokal. Bagi para akademisi, penelitian ini bisa menjadi dasar untuk studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan teknologi dalam administrasi publik di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis Bagi Pembaca

Bagi pembaca, terutama praktisi dan pemerintah Gampong, penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana SIGAP dapat memperbaiki pelayanan publik, para operator dan pejabat Gampong dapat lebih siap dalam menerapkan teknologi ini untuk mempermudah tugas mereka. Bagi penulis, penelitian ini meningkatkan keterampilan dalam menganalisis masalah praktis dan menawarkan solusi berbasis bukti, yang memperkuat kompetensi dalam riset kebijakan publik dan administrasi.

1.4.3 Manfaat Akademis Bagi Penulis

Temuan tentang perbedaan efisiensi administrasi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik antara Gampong yang menerapkan SIGAP dan yang tidak dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi yang tertarik pada pengaruh teknologi terhadap efektivitas pelayanan public. Penelitian ini dapat membuka peluang untuk penelitian lanjutan tentang publik faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIGAP di tingkat desa, serta tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya digitalisasi administrasi publik.

1.4.4 Manfaat Praktis

Temuan ini akan sangat berguna bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi implementasi SIGAP secara lebih luas. Bagi pembaca yang merupakan pembuat kebijakan atau pelaksana program, penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan pendekatan yang lebih baik dalam memperkenalkan teknologi ke dalam sistem administrasi dan pelayanan publik. Bagi penulis, temuan ini memperkaya wawasan tentang kebijakan publik dan implementasi teknologi, yang dapat diterapkan dalam penelitian selanjutnya atau dalam pengembangan kebijakan berbasis teknologi di sektor pemerintahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Komparasi

Komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, yang kemudian dilakukan analisis dengan uji perbandingan. Komparasi juga merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variabel antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Komparasi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya.

Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya *Pengantar Pengetahuan Ilmiah* (1985:84), komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain⁷.

Menurut Nazir (2005:58) penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain⁸.

Metode komparatif melibatkan perbandingan antara dua atau lebih objek, fenomena, atau konsep untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan di antara mereka.

⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik* (Bandung, 1985).

⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Salah satunya yaitu Studi kasus komparatif merupakan metode penelitian yang melibatkan analisis mendalam terhadap dua atau lebih kasus yang dipilih dengan tujuan untuk memahami perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kasus-kasus yang memiliki ciri khas atau konteks spesifik, dan kemudian melakukan perbandingan untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam.

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi dilihat mulai dari proses penerapan atau pelaksanaan rencana, strategi, atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya dalam tindakan nyata. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi mencakup serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya, termasuk manusia, teknologi, dan material, untuk mengubah konsep atau ide menjadi hasil yang dapat dilihat dan diukur⁹.

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukandalamkonteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuanyangditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan¹⁰.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut¹¹.

⁹ Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volume 2 N (2020).

¹⁰ M.Si Dr. H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung, 2006).

¹¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020.

Implementasi George C. Edward III (1980), dalam Sahya Anggara, yang didalamnya menjelaskan untuk mengetahui gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai 4 fokus dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yang terdiri dari ¹²:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan hanya akan efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam mencapainya. Oleh karena itu, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana. Konsistensi ukuran dasar dan tujuan juga perlu dijaga agar pelaksana memahami secara tepat arah kebijakan tersebut. Proses komunikasi dalam organisasi bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan tertentu atau interpretasi yang berbeda dari sumber informasi yang beragam. Agar implementasi berjalan efektif, individu yang bertanggung jawab harus mengetahui tugas mereka secara jelas dan merasa mampu melakukannya. Implementasi kebijakan juga memerlukan penerimaan dan pemahaman yang akurat dari semua personel terkait. Jika kebijakan tidak disampaikan secara jelas, pelaksana akan bingung mengenai apa yang harus dilakukan, sehingga hasil yang diharapkan tidak dapat tercapai secara optimal. Kurangnya komunikasi yang baik kepada pelaksana kebijakan dapat menjadi penghambat serius dalam proses implementasi dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut ¹³.

2. Sumber Daya

Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten implementasi program atau seberapa akurat komunikasi disampaikan, keberhasilan program akan terhambat jika personel yang bertanggung jawab kekurangan sumber daya. Sumber daya ini mencakup jumlah staf yang memadai, keahlian pelaksana, informasi relevan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, kewenangan yang memastikan program berjalan sesuai rencana, serta fasilitas pendukung seperti dana, sarana, dan prasarana yang memadai. Jika sumber daya manusia

¹² George C. III 1980 Edward, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Press).

¹³ Isma Ismaulidina,dkk, "Strategi Komunikasi Public Relation Dalam Membangun Citra Dan Kepercayaan Calon Jemaah Haji Dan Umroh," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 2, no. 1 (2020): 12–17

tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan, program tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna¹⁴. Kurangnya staf pelaksana kebijakan, misalnya, menuntut peningkatan keterampilan para pelaksana agar mampu menjalankan program. Manajemen sumber daya manusia yang baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana sering kali disebabkan oleh kurangnya pengalaman atau pengetahuan, terutama untuk program baru seperti kebijakan konservasi energi yang membutuhkan keahlian khusus, termasuk teknik kelistrikan.

Informasi juga merupakan komponen sumber daya yang krusial. Informasi ini mencakup cara melaksanakan program, tindakan yang harus dilakukan, serta data pendukung untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Sayangnya, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan pelaksana di lapangan dan pemahaman tingkat pusat, sehingga informasi yang dibutuhkan tidak tersedia. Kekurangan informasi atau pengetahuan ini dapat menyebabkan pelaksana tidak bertanggung jawab, absen dari tugas, atau menciptakan inefisiensi.

Selain itu, implementasi kebijakan memerlukan kepatuhan individu dan organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Kewenangan juga menjadi sumber daya penting untuk menentukan cara pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, serta pengadaan staf dan supervisor. Fasilitas yang mendukung, seperti kantor, peralatan, dan dana yang memadai, juga harus tersedia. Tanpa fasilitas ini, keberhasilan program akan sulit dicapai.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap dari implementor. Jika implementor setuju dengan kebijakan yang ada, mereka akan melaksanakannya dengan antusias. Namun, jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi akan menghadapi banyak kendala. Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan, yaitu kesadaran pelaksana, arahan pelaksana untuk merespons kebijakan dengan penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respons tersebut. Meskipun pelaksana mungkin memahami tujuan dan sasaran program, mereka sering gagal melaksanakan program dengan tepat jika mereka menolak

¹⁴ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Kencana; Jakarta, 2017).

tujuannya, sehingga secara diam-diam menghindari atau mengalihkan pelaksanaannya. Selain itu, dukungan dari pejabat pelaksana sangat penting untuk mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dukungan ini tercermin dalam penempatan kebijakan sebagai prioritas program, penugasan pelaksana yang mendukung program, serta perhatian terhadap keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi lainnya. Selain itu, penyediaan dana yang cukup untuk memberikan insentif kepada pelaksana juga sangat penting, agar mereka dapat mendukung dan bekerja dengan sepenuh hati dalam melaksanakan kebijakan atau program.

4. Struktur Birokrasi

Pembahasan mengenai badan pelaksana suatu kebijakan tidak bisa dipisahkan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan-badan eksekutif yang memiliki hubungan, baik potensial maupun nyata, dengan tugas-tugas yang mereka emban dalam melaksanakan kebijakan. Van Horn dan Van Meter mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf badan pelaksana;
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub-unit dan proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber daya politik organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas organisasi;
5. Tingkat komunikasi terbuka, yakni jaringan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas serta kebebasan relatif tinggi dalam berkomunikasi dengan individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal antara badan pelaksana dan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

2.1.3 Teori Transparansi

Transparansi atau keterbukaan informasi publik adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan akses yang memadai dan mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan pentingnya akses informasi publik dan berperan aktif dalam mengawasi setiap kebijakan pemerintah melalui akses tersebut. Pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga membatasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan.

Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menegaskan bahwa hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik dianggap sebagai karakteristik penting dari negara demokratis yang memprioritaskan kedaulatan rakyat untuk mencapai penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala hal yang memiliki dampak pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik juga dianggap sebagai langkah untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam era informasi¹⁵.

Teori yang disampaikan oleh Daniel Schuman. Menurutnya, keterbukaan informasi publik adalah tentang memastikan bahwa pemerintah mempublikasikan data dan informasi yang memungkinkan warga negara untuk memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka, serta untuk mengawasi tindakan dan keputusan pemerintah. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Aspek yang harus dipenuhi untuk mencapai keterbukaan informasi publik yang efektif meliputi;

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik”

1. Aksesibilitas yang dimana informasi harus mudah diakses oleh masyarakat, tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Informasi harus tersedia melalui berbagai saluran, termasuk situs web, media sosial, dan kantor fisik. Informasi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami dan ramah pengguna, termasuk untuk orang dengan disabilitas.
2. Kelengkapan informasi yang disediakan harus lengkap dan mencakup semua aspek yang relevan, seperti kebijakan, program, anggaran, dan hasil kegiatan. Informasi harus cukup rinci untuk memungkinkan masyarakat memahami konteks dan implikasi dari data tersebut.
3. Keakuratan informasi yang disediakan harus akurat dan up-to-date, mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Dan informasi harus menyebutkan sumber data yang jelas dan dapat diverifikasi.
4. Transparansi yang dimana proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan harus transparan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana keputusan dibuat. Serta Pemerintah harus menyediakan laporan berkala tentang kinerja dan penggunaan anggaran.
5. Responsivitas dalam hal ini Pemerintah harus merespons permintaan informasi dari masyarakat dengan cepat dan tepat waktu. Serta harus ada prosedur yang jelas untuk mengajukan permintaan informasi dan menangani keluhan jika akses informasi ditolak.
6. Keamanan Informasi yang bersifat pribadi harus dilindungi dengan baik, sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Sistem informasi harus dilindungi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan.
7. Partisipasi Publik, masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan forum diskusi. Pemerintah harus menyediakan mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti umpan balik dari masyarakat mengenai kualitas informasi yang diberikan.
8. Legalitas, semua kegiatan keterbukaan informasi harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang keterbukaan informasi

publik. Pemerintah dan masyarakat harus memahami hak dan kewajiban mereka terkait akses informasi publik¹⁶.

2.1.3.1 Indikator Transparansi

Indikator transparansi menurut para ahli mencakup beberapa aspek kunci yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana informasi publik disediakan dan diakses oleh masyarakat. Berikut adalah indikator dari transparansi dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang telah dikemukakan oleh Dwiyanto dalam (Nengsih Dkk, 2019) yaitu sebagai berikut¹⁷:

1) Keterbukaan Dalam Proses Pelayanan Publik

Keterbukaan informasi publik dalam proses pelayanan publik merupakan prinsip penting yang memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah dan luas terhadap informasi yang dikelola oleh badan publik. Prinsip ini bertujuan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Dalam pelayanan publik, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk memahami prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian layanan, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan adil. Dengan informasi yang terbuka, badan publik dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan mereka, sekaligus mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterbukaan informasi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, menyampaikan keluhan, atau menuntut perbaikan layanan.

Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah

¹⁶ Lucky Enggraini Fitri et al., "Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis TIK Di Desa Nyogan Menuju Tata Kelola Good Governance Dan Kemandirian Desa," *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, (2021)

¹⁷ Nengsih, W., Adnan, dkk "Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang.," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, (2019).

terpencil, dan resistensi dari beberapa instansi. Namun, jika diterapkan dengan baik, keterbukaan informasi publik mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

2) Penyediaan Informasi yang Jelas

Penyediaan informasi yang jelas merupakan aspek penting dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Informasi yang jelas berarti informasi yang disampaikan harus akurat, lengkap, mudah dipahami, serta tersedia dalam format yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini mencakup penyampaian informasi terkait prosedur, persyaratan, biaya, waktu penyelesaian, dan hasil yang diharapkan dari suatu layanan publik.

Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat mengakses layanan tanpa kebingungan, mengurangi potensi kesalahan, dan menghindari praktik percaloan atau korupsi. Selain itu, informasi yang jelas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik karena mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses layanan. Penyediaan informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti situs web resmi, papan informasi di kantor pelayanan, panduan cetak, atau aplikasi digital. Dengan demikian, penyediaan informasi yang jelas tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menciptakan sistem pelayanan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

3) Kemudahan Akses Informasi

Kemudahan akses informasi adalah prinsip penting dalam keterbukaan informasi publik yang memastikan bahwa semua orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa hambatan yang tidak perlu. Dengan memperhatikan ketersediaan di berbagai saluran seperti, platform digital dan pusat layanan publik. dalam mendapatkan kemudahan akses informasi juga harus memperhatikan format yang ramah pengguna yang dimana informasi harus disajikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, menghindari jargon atau istilah teknis yang membingungkan. dan menggunakan format visual, keterbukaan dan transparansi, aksesibilitas untuk semua kalangan, teknologi dan infrastruktur,

pemberdayaan masyarakat, ketersediaan data yang relevan dan up-to-date dan menyiapkan mekanisme pengaduan.

2.1.4 Teori Strategi Kebijakan

Kata strategi memiliki beberapa macam makna dan arti. Kata strategi berasal dari kata “strategos” dalam bahasa Yunani, merupakan gabungan dari kata “stratos” yang berarti militer dan “ag” yang berarti memimpin. Pada awalnya strategi merupakan hal yang lumrah dalam dunia militer menghadapi peperangan untuk mengalahkan musuh. Berbeda dengan organisasi bisnis atau organisasi publik, organisasi pemerintahan tidak memiliki keleluasaan secara tajam untuk membedakan posisi antar pemangku kepentingan (*stake holder*). Hingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun stakeholder yang memiliki posisi yang dominan dalam organisasi pemerintahan. Karena pada dasarnya organisasi pemerintahan memiliki ketergantungan yang tinggi akan tetapi relatif merata pada hampir semua stakeholder yang ada.

Pada dasarnya, strategi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi, strategi berperan dalam menentukan arah pengembangan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Strategi dirancang untuk merumuskan langkah yang tepat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Agar efektif, strategi yang dirancang harus diimplementasikan secara nyata dalam proses penyelesaian masalah, sehingga keberhasilannya dapat diukur berdasarkan pelaksanaannya¹⁸.

Strategi menjadi dasar utama bagi sebuah organisasi dan elemen-elemennya dalam merancang langkah atau tindakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun strategi, penting untuk memperhatikan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Selain itu, organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat strategi tersebut diterapkan, sehingga strategi yang dirancang selaras dengan kondisi yang ada. Dengan

¹⁸ Erlina T.V. Timpal, Agustinus B. Pati, and Fanley Pangemanan, “Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa Di Bidang Teknologi Informasi Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Governance*, (2021).

demikian, strategi berfungsi sebagai perwujudan misi organisasi untuk menjembatani hubungan antara organisasi dan lingkungannya.

Strategi harus mampu beradaptasi untuk menghadapi berbagai isu strategis yang muncul di lingkungannya, serta memberikan respons organisasi terhadap pilihan kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, strategi dirancang dengan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dikutip Supriatna dari Marrus, strategi didefinisikan sebagai proses perencanaan yang dilakukan oleh para pemimpin puncak dengan fokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapainya. Berdasarkan definisi Marrus, strategi dapat diartikan sebagai cara pemimpin puncak menentukan rencana yang bertujuan untuk mengarahkan perusahaan atau instansi dalam mewujudkan targetnya. Dengan demikian, strategi dirancang sebagai alat yang memastikan organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Geoff Mulgan mengungkapkan bahwa "Strategi publik adalah penggunaan sistematis sumber daya dan kekuasaan publik oleh lembaga publik untuk mencapai kepentingan umum." Pendekatan strategi yang disampaikan oleh Geoff Mulgan lebih berfokus pada organisasi pembuat kebijakan, seperti pemerintah. Dalam hal ini, strategi berfungsi sebagai sistem yang mengelola kekuasaan dan sumber daya melalui lembaga publik dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan pengertian di atas, Geoff Mulgan menguraikan strategi pemerintahan dalam tiga indikator, yaitu:

1. Purposes (Tujuan)

Peneliti mengacu pada konsep masyarakat Jepang, **Ikigai**, yang berarti alasan untuk tujuan hidup. Indikator dari Ikigai meliputi mission (misi) dan passion/vocation (bakat/kemampuan). Konsep ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, dibutuhkan misi yang jelas serta kemampuan untuk menjalankan dan mengimplementasikannya

2. Direction (Pengarahan)

Peneliti mengacu pada teori George R. Terry (1986) yang mendefinisikan pengarahan sebagai upaya menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai sasaran perusahaan melalui keinginan dan usaha mereka sendiri. Ada empat indikator dalam

pengarahan, yaitu koordinasi (coordination), motivasi (motivation), komunikasi (communication), dan perintah (command).

3. Action (Tindakan)

Peneliti mengacu pada teori George R. Terry (1986) yang mendefinisikan pengarahan sebagai upaya menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai sasaran perusahaan melalui keinginan dan usaha mereka sendiri. Ada empat indikator dalam pengarahan, yaitu koordinasi (coordination), motivasi (motivation), komunikasi (communication), dan perintah (command).

Dari ketiga komponen yang diungkapkan oleh Mulgan, terlihat adanya unsur politik yang kuat, yang berfokus pada pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kepentingan pemerintahan. Strategi yang dijelaskan oleh Geoff Mulgan merupakan strategi publik yang berbeda dengan strategi yang diterapkan di perusahaan.

Menurut teori Mulgan, ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam desain dan implementasi strategi, yaitu power (kekuasaan) dan knowledge (ilmu pengetahuan). Faktor inilah yang mendasari peneliti untuk menggunakan teori dan komponen yang disampaikan oleh Mulgan, karena pendekatan yang digunakan relevan dalam konteks politik dan pemerintahan untuk merancang serta mengimplementasikan strategi dalam pelayanan publik.

2.1.5 SIGAP (Sistem Informasi Gampong)

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Gampong (SIGAP) adalah sebuah website yang dirancang khusus untuk membantu dalam pengelolaan dan penyediaan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan di sebuah Gampong. SIGAP biasanya mencakup beragam fitur dan modul, termasuk administrasi Gampong, data penduduk, manajemen keuangan Gampong, usaha Gampong, potensi yang dimiliki Gampong dan lain sebagainya. Tujuan utama dari SIGAP ini adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintah Gampong yang efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi Gampong serta mempermudah akses

masyarakat terhadap informasi dan layanan yang mereka butuhkan¹⁹. Dalam pasal 3 menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sistem informasi terpadu yang terdiri dari sistem Informasi, pengelolaan satu data, layanan keterbukaan informasi publik untuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas serta berkelanjutan di Gampong.

Dalam pengimplementasian SIGAP, Pemerintah Gampong harus bertanggung jawab atas manajemen, pembaruan, pengamanan, dan perlindungan data dan informasi yang terdapat di dalamnya, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah Gampong harus meningkatkan keterampilan pengelola SIGAP dan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) untuk mendukung manajemen SIGAP.

Berikut ruang lingkup dari PERGUB No 33 Tahun 2021 ini mencakup beberapa aspek utama yang dirancang untuk memastikan keberhasilan implementasi dan pengelolaan SIGAP, yaitu:

1. Fungsi SIGAP

Mengatur peran dan tujuan utama SIGAP sebagai alat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi publik di tingkat gampong. Fungsi ini mencakup pengelolaan data, penyediaan informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

2. Perangkat Gampong

Mengatur komponen teknologi yang digunakan dalam implementasi SIGAP, termasuk perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan jaringan komunikasi. Hal ini memastikan bahwa sistem SIGAP dapat beroperasi secara optimal dan terintegrasi.

3. Muatan SIGAP

Menentukan jenis informasi yang wajib tersedia dan ditampilkan melalui SIGAP. Informasi tersebut meliputi data kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dokumen pembangunan, regulasi desa, dan data lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁹ Diana Hertati, "Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sidoarjo," *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, (2020)

4. Pengembangan SIGAP

Menyusun kebijakan yang mendukung inovasi dan peningkatan fungsi SIGAP untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Termasuk di dalamnya pengembangan fitur baru, pemeliharaan sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Pengelolaan SIGAP

Mengatur tata kelola SIGAP, termasuk tanggung jawab perangkat desa, aparat pemerintah daerah, dan pihak lain yang terlibat. Peraturan ini memastikan pengelolaan SIGAP dilakukan secara profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

6. Tata Cara Penerapan SIGAP

Memberikan panduan rinci tentang prosedur penerapan SIGAP, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Panduan ini bertujuan untuk memastikan implementasi SIGAP sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

7. Hak dan Kewajiban

Menjelaskan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang disediakan melalui SIGAP secara mudah dan terbuka, serta kewajiban pemerintah gampong untuk menyediakan informasi yang valid, akurat, dan terkini.

8. Pendanaan

Mengatur sumber pendanaan untuk operasional dan pengembangan SIGAP, termasuk alokasi anggaran dari pemerintah desa, dana dari pemerintah daerah, serta dukungan dari pihak lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.1.6 Teori E-Governance

Reformasi pada dasarnya merupakan suatu gerakan yang menjadikan administrasi sebagai instrumen yang lebih baik dalam mencapai tujuan umum masyarakat. Dengan demikian maka konsekuensinya adalah tersedianya beragam alternatif pilihan terhadap alat (instrumen) untuk mencapai tujuan tersebut. Seiring dengan dibutuhkannya suatu media yang mampu menyajikan pelayanan publik secara cepat, murah, efektif dan efisien sebagai upaya perwujudan administrative reform di sektor publik, maka konsep yang

memiliki keterkaitan dengan itu adalah konsep mengenai e-government. Sehingga selanjutnya dalam kerangka teori akan dipergunakan konsep mengenai e-government²⁰.

E-Government merupakan kepanjangan dari Electronic Government. Electronic Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan, dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan keuangan pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. Electronic Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien²¹.

Menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, maka pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas-aktivitas yang berkaitan yaitu pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kinerja antara elektronik serta pemerintahan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara.

Penerapan e-government juga memiliki sejumlah tujuan atau bahkan e-government dijadikan sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu West dalam Septiani; kartika; (2006:34) mengemukakan bahwa e-government secara umum bertujuan untuk :

1. Memberikan akses yang lebih luas pada informasi-informasi pemerintahan.
2. Mempromosikan keterlibatan masyarakat dengan memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah.
3. Membuat pemerintahan semakin akuntabel melalui pemerintahan yang lebih transparan sehingga dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan korupsi.
4. Memudahkan pemerataan pembangunan dan akses layanan pemerintah, khususnya pada masyarakat urban dan pedesaan.

²⁰ Etin Indrayani, *E-Government: Konsep, Implementasi Dan Perkembangannya Di Indonesia*, 2020.

²¹ L Muliawaty and S Hendryawan, "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)," (2020)

5. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan .
6. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
7. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.

2.1.7 Teori Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang dirancang oleh manusia dan terdiri atas berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan utama, yaitu menyajikan informasi. Sistem ini terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi.

Menurut Poerwanta Dkk (2013), Basis Data (database) menjadi salah satu komponen utama dalam sistem informasi karena berperan sebagai dasar dalam penyediaan informasi serta menentukan kualitasnya, yang meliputi aspek akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. Informasi dianggap bernilai jika manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Selain itu, penggunaan basis data juga dapat mengurangi pemborosan ruang penyimpanan eksternal. Secara etimologis, istilah "sistem informasi" terdiri dari dua kata, yaitu "sistem" dan "informasi."

Menurut Laudon dan Laudon (2017), sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Sistem informasi juga membantu manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, juga menciptakan produk atau inovasi baru. Sistem informasi berisi informasi penting berupa,

orang, tempat/lokasi, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan organisasi dan lingkungan luar organisasi tersebut²².

Menurut Sutabri (2016) informasi dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan dan harus jelas dalam mencerminkan arti dari informasi tersebut karena dari sumber informasi hingga penerima informasi ada kemungkinan terjadinya gangguan sehingga informasi yang diperoleh dapat 'rusak'.

2. Tepat waktu

Informasi yang diterima tidak boleh terlambat, jika terlambat, nilai dari informasi tersebut tidak ada. Informasi merupakan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jika informasi yang diterima terlambat maka akan mengganggu aktivitas pengambilan keputusan dan dapat berakibat fatal bagi organisasi.

3. Relevan

Relevansi informasi berbeda untuk suatu individu dengan lainnya, suatu divisi dengan lainnya sehingga suatu informasi harus ditujukan kepada penerima yang tepat. Contohnya adalah informasi tentang rusaknya suatu mesin akan lebih relevan bagi staf teknik dalam suatu perusahaan dibandingkan bagi staf administrasi

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama yang ditulis oleh Irfan Nur Setiawan, Rifki Agung Kusuma Putra yang berjudul Data Dan Sistem Informasi Desa dalam Era Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Ciamis pada tahun 2021, dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pembahasan dan hasil penelitian ini adalah bahwa Tingkat transparansi terkait data dan informasi masih tergolong rendah, dengan aksesibilitas teknologi informasi yang juga masih kurang dan memerlukan perbaikan. Kualitas sumber daya manusia yang mengelola data dan informasi juga masih rendah, sehingga diperlukan peningkatan dalam

²² I Yunita and J Devitra, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Pada SMK Negeri 4 Kota Jambi," *Jurnal Manajemen Sistem Informasi* (2017).

aksesibilitas teknologi informasi, kualitas SDM, dan pengolahan data. Data yang baik tentunya dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa²³.

Penelitian Kedua yang ditulis oleh Ach. Karimullah yang berjudul Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia pada tahun 2022, dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pembahasan dan hasil penelitian ini adalah bahwa Sistem informasi desa berbasis teknologi diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan data desa, termasuk penyimpanan, pemrosesan, dan pengolahan data. Hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan di tingkat desa. Pemerintah desa harus menyadari bahwa pembaruan data administrasi desa adalah dasar dari perencanaan pembangunan desa. Pembaruan data administrasi desa akan memudahkan proses pembangunan. Manfaat penggunaan sistem informasi desa dalam pembangunan meliputi percepatan pelayanan desa, pengelolaan data desa, dan pemanfaatan data desa²⁴. Transparansi pemerintah desa juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya kelengkapan data administrasi desa, lemahnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi desa, serta kurangnya perhatian masyarakat desa terhadap informasi pembangunan. Faktor eksternal meliputi ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan sistem informasi di desa.

Penelitian Ketiga yang ditulis Muthmainna Ahmad yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang pada tahun 2019, dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pembahasan dan hasil penelitian ini adalah bahwa Ketepatan waktu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Mata Allo Kabupaten Enrekang masih kurang memadai. Namun, dengan adanya sistem informasi desa, pemerintah desa dapat memberikan pelayanan lebih mudah kepada masyarakat. Staf kantor desa Mata Allo Kabupaten Enrekang perlu mendapat pelatihan mengenai sistem informasi desa. Pelayanan yang optimal akan lebih terukur dengan adanya fasilitas seperti perangkat pendukung jaringan

²³ Rifki Agung Kusuma Putra, "Data Dan Sistem Informasi Desa Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, (2021).

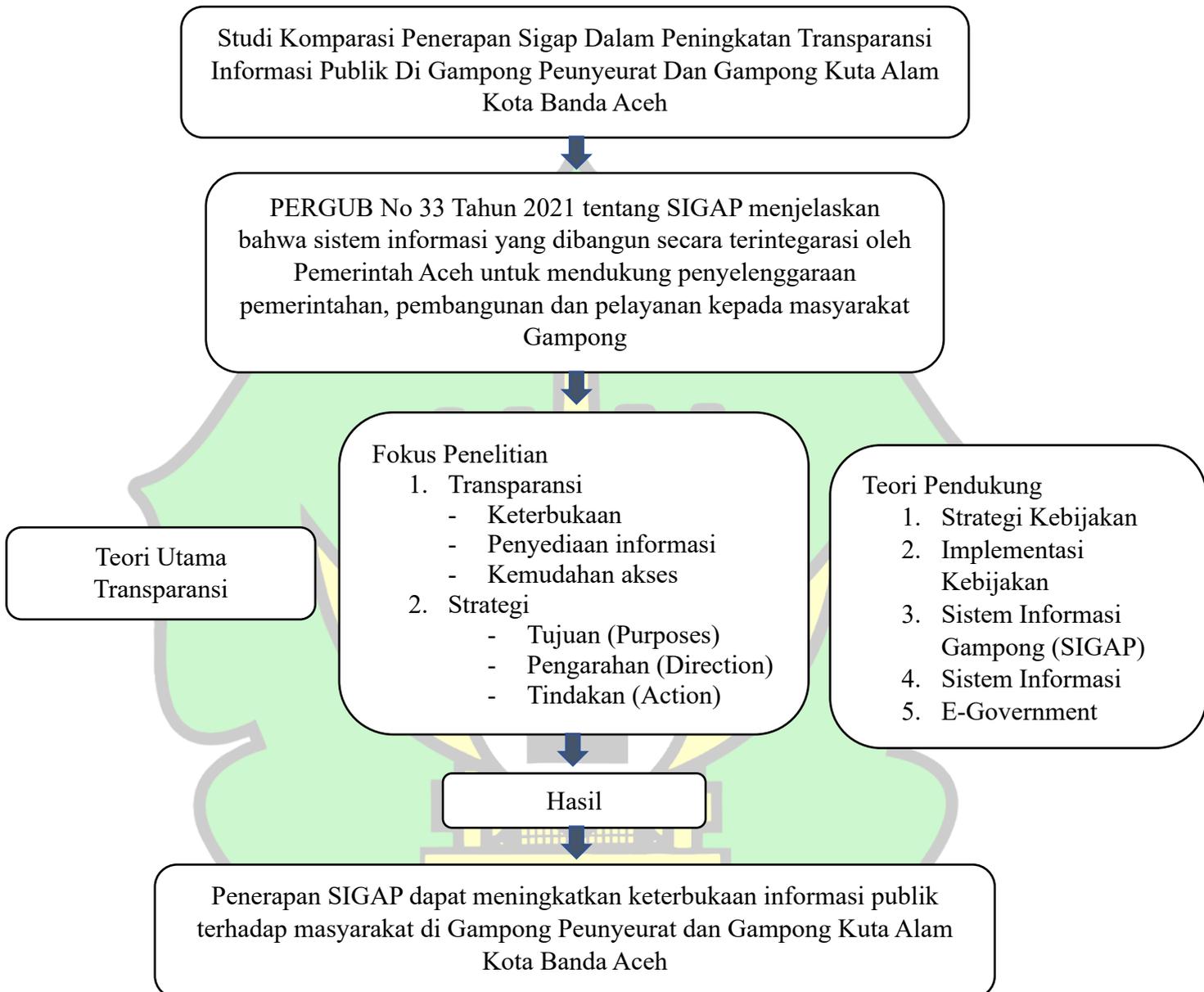
²⁴ Ach. Karimullah, Redy Rifky Maulany, and Muhammad Amiruddin, "Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Di Indonesia." *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*", (2022)

internet, yang masih dalam proses perbaikan, serta pengadaan website desa untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Efektivitas penerapan sistem informasi desa dalam memberikan pelayanan disiplin kepada masyarakat desa Mata Allo Kabupaten Enrekang dilakukan dengan mengikuti standar ²⁵.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama berfokus pada teori penerapan dan keterbukaan informasi publik dan bagaimana penerapan sistem informasi desa/gampong. serta sama-sama meneliti tentang keterbukaan informasi dalam suatu gampong. Dan jika melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada desain penelitian, lokus dan fokus penelitian. Penelitian yang peneliti teliti berfokus pada desain penelitian studi komparasi yang membandingkan penerapan sistem informasi gampong pada dua gampong/desa dalam meningkatkan transparansi informasi publik, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penerapan sistem informasi desa dalam melihat pembangunan desa. dan juga dari persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

²⁵ Haryadi Suyuti, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mata Allo Kabupaten Enrekang” (2019)

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara atau metode penelitian yang menekankan pada analisis atau deskripsi. Dalam proses penelitian kualitatif, perspektif subjek lebih ditekankan, dan peneliti menggunakan teori sebagai panduan untuk memahami fakta yang ditemui selama penelitian lapangan ²⁶.

Adapun pendekatan peneliti yang digunakan peneliti jenis penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data, informasi dan fakta lapangan.

Oleh karena itu pada dasarnya pendekatan kualitatif sebagaimana Suetanyo (2012, hlm 65) ²⁷ menyebutkan sebagai berikut:

Pendekatan kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji dan menggali kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, terutama kasusistik sifatnya, namun mendalam dan total/menyeluruh, dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variable.

Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data yang mendalam pula. Metode ini lebih fokus pada pengamatan fenomena dan meneliti makna yang mendasari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kecermatan dalam penggunaan kata dan kalimat ²⁸.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Menurut Winarno Surakhmad

²⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2017.

²⁷ Suetanyo, *Pendekatan Kualitatif*, 2012.

²⁸ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif," Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah (1986: 84), komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.

Langkah-langkah dalam studi kasus komparatif:

- a. Pemilihan Kasus
- b. Penentuan Variabel atau Faktor yang Dibandingkan
- c. Pengumpulan Data
- d. Analisis Data
- e. Perbandingan dan Interpretasi
- f. Kesimpulan dan Implikasi

Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan SIGAP (Sistem Informasi Gampong) dalam meningkatkan transparansi informasi publik di dua Gampong yang berbeda. Penelitian komparatif memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi pola, memahami pengaruh variabel tertentu, dan menguji teori dalam konteks yang berbeda. Dengan membandingkan dua atau lebih kelompok, lokasi, atau variabel, penelitian ini membuka peluang untuk menemukan hubungan sebab-akibat yang mendalam, memahami bagaimana budaya, kebijakan, dan lingkungan memengaruhi hasil, serta mengeksplorasi implikasi yang relevan bagi kebijakan atau praktik²⁹.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penerapan SIGAP di kedua Gampong, seperti bagaimana kebijakan lokal, tingkat partisipasi masyarakat, atau sumber daya yang tersedia memengaruhi keberhasilan program. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendorong keberhasilan SIGAP, sehingga memberikan wawasan strategis untuk memperbaiki program serupa di masa depan.

Proses ini mencakup pengumpulan data melalui metode seperti wawancara mendalam dengan perangkat Gampong dan masyarakat, observasi lapangan terhadap pelaksanaan program, serta analisis dokumen resmi yang relevan. "Data yang diperoleh

²⁹ Sukirman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan : Penerbit Aksara Timur, hlm. 06, 2021).

kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat serta pengaruh variabel kontekstual terhadap transparansi informasi publik”³⁰.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai upaya yang dilakukan peneliti dalam melakukan pemusatan pikiran dilapangan agar memperoleh data, faskta dan informasi yang diperlukan peneliti untuk penyelesaian skripsi. Menurut Moleong (2014:97) menyebutkan bahwa “Fokus penelitian adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.

Fokus penelitian ini yaitu membandingkan penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik di Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

1. Mekanisme Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik di Gampong Peunyerat dan Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Tabel 3.1 Dimensi, Indikator dan sumber, Mekanisme Penerapan SIGAP

| No | Dimensi | Indikator | Sumber |
|----|--------------|---|-------------------|
| 1. | Transparansi | a. Penyediaan Informasi b. Kemudahan Akses c. Keterbukaan | Nengsih dkk, 2019 |

2. Strategi penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Peunyerat dan Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Tabel 3. 2 Dimensi, Indikator dan Sumber Strategi Penerapan SIGAP

| No | Dimensi | Indikator | Sumber |
|----|----------|---|-----------------------|
| 1. | Strategi | a. Purposes (Tujuan) b. Direction (Pengarahan) c. Action (Tindakan) | Geoff Mulgan, 2009 |

³⁰ D Y Darsiswanti, “Studi Komparatif Analisis Community Based Tourism Antara Desa Karangrejo Dan Desa Karanganyar Sebagai Desa Wisata” *JMAN Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara* , (2022)

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu objek yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Keuchik Gampong Peunyeurat, Kantor Keuchik Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh dan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. Alasan saya memilih dua lokasi penelitian ini adalah karena Gampong Peunyeurat merupakan salah satu Gampong yang telah menerapkan SIGAP dan meraih penghargaan Lomba Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023. Hal ini menarik perhatian saya untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan kesuksesan penerapan SIGAP di Gampong tersebut. Di sisi lain, Gampong Kuta Alam, juga telah menerapkan SIGAP dari DPMG Aceh seperti Gampong Peunyeurat, tetapi belum mencapai tingkat keberhasilan yang sama dalam penerapan SIGAP. Oleh karena itu, saya tertarik meneliti Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam untuk mengidentifikasi strategi dalam penerapan SIGAP, serta mencari solusi yang mungkin dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program ini di masa depan.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang berupa kata-kata tulisan atau lisan, gerak tubuh, atau perilaku yang dilakukan oleh orang yang dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan), dalam kaitannya dengan variabel yang diteliti³¹. Data primer dalam penelitian ini adalah dengan informan dari masyarakat, Kepala Desa, Operator Desa, Tenaga pelaksana SIGAP dari DPMG dan dari observasi yang dilakukan di kantor Keuchik Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) Data sekunder merujuk kepada sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, contohnya melalui perantara orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup referensi seperti

³¹ Syafni Dawaty, "Data Primer," Websiter Universitas Raharja, 2020.

Undang-Undang Desa Pasal 86 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa, serta regulasi dari Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2022. Selain itu, data sekunder juga meliputi informasi yang diperoleh dari media massa, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian tentang sistem informasi gampong³².

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang peneliti menggunakan suatu teknik tertentu sehingga memudahkan peneliti dalam perolehan data lapangan, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari individu atau kelompok. Wawancara bisa bersifat lisan atau tertulis, dan dilakukan oleh satu orang atau lebih yang biasa disebut pewawancara³³. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana informasi diperoleh melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, dimana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan jawaban diberikan oleh responden. Menurut Hopkins, wawancara adalah metode untuk memahami situasi tertentu dalam kelas dari perspektif yang berbeda.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan terhadap objek atau situasi tertentu, sering kali disertai dengan pencatatan detail terhadap kondisi atau perilaku yang diamati. Metode observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap kondisi atau perilaku suatu objek³⁴. Dalam metode ini, peneliti merasakan dan memahami fenomena dengan mengamati secara langsung di lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk meninjau dan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap situasi yang diamati, yang kemudian dapat digunakan untuk memvalidasi desain penelitian yang sedang dilakukan³⁵.

³² Endang Solihin, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*, 2021.

³³ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 45 2020), hal. 138.

³⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal 145,"

³⁵ Yusuf Abdul Azis, "Metode Observasi," deepublish Store, 2022.

3.5.3 Dokumentasi

Metode ini merujuk pada pengumpulan data dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam bentuk buku, catatan, atau dokumen lainnya. Dalam metode ini, petugas pengumpulan data hanya perlu mentransfer informasi yang relevan dari bahan tertulis ke lembaran kerja yang telah disiapkan. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif di mana banyak informasi dan fakta disimpan dalam bentuk dokumentasi, seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal, dan sejenisnya³⁶.

3.6 Informan Penelitian

Tabel 3. 3 Daftar Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|----|-------------------------------|----------|
| 1 | Keuchik Gampong Peunyeurat | 1 Orang |
| 2 | Keuchik Gampong Kuta Alam | 1 Orang |
| 3 | Sekretaris Gampong Peunyeurat | 1 Orang |
| 4 | Sekretaris Gampong Kuta Alam | 1 Orang |
| 5 | Operator Gampong Peunyeurat | 1 Orang |
| 6 | Operator Gampong Kuta Alam | 1 Orang |
| 7 | Masyarakat Gampong Peunyeurat | 2 Orang |
| 8 | Masyarakat Gampong Kuta Alam | 2 Orang |
| | Jumlah | 10 Orang |

Pemilihan informan penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi seputaran SIGAP, dengan memilih beberapa orang yang dapat di andalkan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara terbuka. Maka dari itu pemilihan informan penelitian secara keseluruhan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data bertujuan untuk menegaskan apakah penelitian yang dilakukan memenuhi standar penelitian ilmiah dan untuk menguji validitas data yang

³⁶ Hikmawati, "Metodologi Penelitian," 2020

dikumpulkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup uji kredibilitas yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu³⁷.

3.7.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan mengecek dan memastikan data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui berbagai sumber kemudian dideskripsikan, dikelompokkan, memilah mana pandangan yang sama sehingga dari perbandingan tersebut diperoleh kesimpulan dari sumber yang diperoleh.

3.7.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan mengecek dan membandingkan informasi dan data yang diperoleh oleh peneliti kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dapat dilakukan melalui hasil wawancara yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan hasil observasi dan studi dokumentasi penelitian.

3.7.3 Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara pengecekan hasil wawancara dan observasi dalam waktu dan keadaan yang berbeda. Perbedaan waktu dalam pengumpulan data dapat memperoleh hasil yang berbeda maka dari itu dapat dilakukan secara berulang hingga diperoleh data yang pasti dan valid sehingga lebih kredibel.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat induktif, yang berarti analisis didasarkan pada data yang dikumpulkan, kemudian pola hubungan tertentu dikembangkan. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi³⁸.

³⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta Surono. 2011.

³⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan," Bandung: Alfabeta. hlm.341., 2010.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁹

3.8.1 Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan pengklasifikasian dan penyusutan data mentah yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mempermudah pemahaman. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempertajam, memilih, dan memfokuskan data sehingga memungkinkan pembuatan dan verifikasi kesimpulan akhir dari penelitian.

3.8.2 Penyajian Data (Data Display)

Pada penelitian kualitatif ini penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan uraian singkat dapat berupa teks yang sifatnya naratif. Dalam penyajian data dapat disajikan data berupa hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

3.8.3 Conclusion Drawing/Verification

Proses ini melibatkan pembuatan kesimpulan awal yang bersifat provisional, yang dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel.

³⁹ Subino Hadi Subroto, "Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data Dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif," (Bandung : hlm.17), 1999.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peraturan Gubernur (PERGUB) Aceh No 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong (SIGAP) menetapkan SIGAP sebagai sistem terintegrasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat Gampong. Diperkenalkan sebagai kebijakan unggulan oleh Pemerintah Aceh sejak tahun 2018, SIGAP bertujuan utama untuk meningkatkan transparansi informasi publik. Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan relevan mengenai berbagai program serta aktivitas pemerintah, dengan harapan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih besar serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Website SIGAP dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, serta didukung oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) pada periode 2018-2019. Pengembangan website ini merupakan langkah nyata dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 86, yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. SIGAP juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi, yang menghubungkan Gampong, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi melalui Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT).

SIGAP menyediakan berbagai jenis data yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data yang tersedia dalam SIGAP meliputi beberapa kategori, antara lain:

1. Seuramo Informasi: Menyajikan berbagai informasi umum yang relevan dengan Gampong.
2. Informasi Kependudukan: Memuat data mengenai jumlah penduduk, demografi, serta informasi terkait lainnya yang berkaitan dengan penduduk Gampong.

3. Informasi Kemiskinan Gampong: Menyediakan data mengenai tingkat kemiskinan di Gampong, termasuk indikator dan statistik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
4. Informasi Rencana dan Anggaran: Menginformasikan rencana pembangunan dan alokasi anggaran yang ditujukan untuk berbagai proyek dan kegiatan di Gampong.
5. Layanan Informasi Pelatihan Aparatur Gampong: Menyajikan informasi mengenai pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur Gampong, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

Kota Banda Aceh 90 gampong yang tersebar di 9 kecamatan., di antaranya adalah Gampong Geuceu Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam.

4.1.1 Gampong Peunyeurat

4.1.1.1 Sejarah Singkat Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

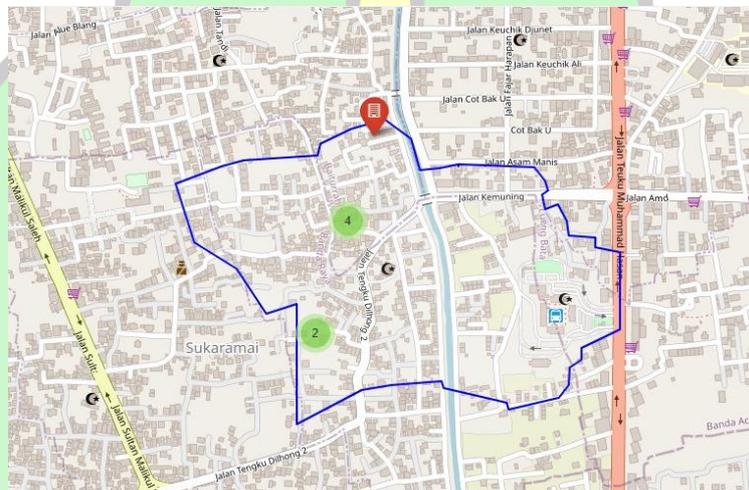
Nama Gampong Peunyerat terdiri dari dua suku kata, yaitu "peu" dan "nyerat." Berdasarkan keterangan dari narasumber dan pelaku sejarah, meskipun bukan asli penduduk Gampong Peunyerat, Bapak Zulkifli Madjid menjelaskan bahwa kata "peu" bermakna "apa," sementara "nyerat" berarti "anyaman." Nama Peunyerat memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan keahlian masyarakat setempat pada masa lalu. Dahulu, pada masa penjajahan Belanda, gampong ini dikenal sebagai tempat para ahli (pande) yang mahir dalam berbagai kerajinan seperti pande mas (pengrajin emas), pembuat anyaman jala, dan anyaman jaring ikan.

Banyak sejarawan yang datang ke Gampong Peunyerat untuk mempelajari aktivitas para pande tersebut. Ketika mereka bertanya kepada masyarakat setempat tentang apa yang sedang dikerjakan oleh para pengrajin, jawaban "peu nyerat" akhirnya menjadi nama gampong ini, merujuk pada kegiatan menganyam yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

Menurut penuturan para orang tua di gampong, Gampong Peunyerat telah ada atau terbentuk sekitar tahun 1890 M. Keberadaan gampong ini dapat dibuktikan dengan adanya saksi-saksi yang masih hidup, yang menyimpan cerita sejarah tentang kehidupan masyarakat pada masa lampau. Hal ini menunjukkan bahwa Gampong Peunyerat memiliki sejarah panjang yang kaya akan budaya dan tradisi.

4.1.1.2 Letak Geografis Gampong Peunyeurat Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh

Gampong Peunyeurat adalah sebuah gampong yang terletak di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kecamatan Banda Raya, dengan luas wilayah 1,05 km². Secara geografis, Gampong ini berada pada koordinat 5.53159574940215 (latitude) dan 95.32388985157014 (longitude). Gampong Peunyeurat berbatasan dengan Gampong Ateuk Jawo di sebelah utara, Gampong Lam Cot di sebelah selatan, Gampong Lhong Raya di sebelah barat, dan Gampong Batoh di sebelah timur.



Gambar 4. 1 Letak Geografis Gampong Peunyeurat

Sumber: Google Maps

4.1.2 Gampong Kuta Alam

4.1.2.1 Sejarah Singkat Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh

Pada tahun 1950-an Gampong Kuta Alam Masih Bernama Aceh Study Fond yang saat itu Kepala Desanya Bernama Sutrisno, dan masih terdapat banyaknya bukit-bukit sebagai salah satu benteng yang alami sebagai pertahanan kerajaan MEUKUTA ALAM saat berperang melawan penjajah, atas dasar itulah benteng-benteng tersebut dinamakan KUTA dan alami itu adalah ALAM oleh sebab itulah dinamakan KUTA ALAM. Pemerintahan Gampong Kuta Alam masih berstatus Pemerintahan Desa, dan dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1979, sebagai realisasinya status Pemerintahan Desa Kuta

Alam berubah menjadi Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Kepala Gampong sampai bulan Mei tahun 2010, dan sejak saat itu pula Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Kuta Alam itu disusun sebagaimana dimaksud Keputusan Mendagri Nomor : 44 Tahun 1980.

Pada Tahun 2010 status Gampong berubah menjadi Gampong, saat itu yang menjabat sebagai Pj.Lurah adalah Bpk. REZA KAMILIN. S.STP dan Tuha Peut Bpk. H.Suryadi Insya. Pada bulan Mei tahun 2010 diadakan pemilihan Keuchik yang pertama yang disertai tiga orang calon keuchik saat itu adalah: Hasbuna, Ishak, H. Suid Ab,S.Pd,M.Pd. Hasil dari pemilihan keuchik tahun 2010 dimenangkan oleh Bpk. Drs.H. SUID AB, S.Pd, M.Pd.

Keadaan penduduk di Gampong Kuta Alam pada umumnya terdiri dari suku Aceh sedangkan suku lainnya, seperti suku Batak, Padang, Jawa, Gayo, hanya beberapa Kepala Keluarga saja. Sedangkan status penduduk di Gampong Kuta Alam dapat diklasifikasikan penduduk asli dan pendatang sejak lama yang membangun rumah diatas tanah miliknya dan menetap, sedangkan sebagian adalah penyewa (kost).

Adapun penduduk dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini bukan karena faktor kelahiran saja, akan tetapi karena banyaknya mahasiswa dan pelajar yang memilih lokasi/tempat tinggal di Gampong Kuta Alam hal ini disebabkan selain Gampong Kuta Alam sangat ideal sebagai tempat tinggal bagi para mahasiswa/pelajar dan juga para penduduk juga telah banyak membangun rumah-rumah sewa atau menyewa kamar (kost).

4.1.2.2 Letak Geografis Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh

Secara Geografis Gampong Kuta Alam terletak dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Dengan luas wilayah 58,75 Ha, dengan jumlah penduduk 4640 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga mencapai 873 KK. Seluruh penduduk berstatus kewarganegaraan WNI dan tidak ada warga negara asing.



Gambar 4. 2 Letak Geografis Gampong Kuta Alam

Sumber: uptbgis.bandaacehkota.go.id

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik di Gampong Peunyeurat

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis indikator-indikator yang berhubungan dan mempengaruhi mekanisme penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh untuk memperoleh gambaran dan fakta yang menyeluruh di lapangan mengenai mekanisme penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat. Selanjutnya, peneliti menjelaskan indikator penelitian untuk mengetahui tanggapan atau persepsi informan atas penerapan SIGAP. Pada penelitian ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu penyediaan informasi, kemudahan akses, dan keterbukaan informasi publik.

4.2.1.1 Penyediaan Informasi

Penyediaan informasi secara umum merujuk pada proses memberikan akses atau menyajikan data, fakta, atau pengetahuan yang relevan dan berguna bagi pihak yang

membutuhkan. Informasi yang disediakan dapat berupa berbagai bentuk, seperti dokumen, laporan, data elektronik, atau komunikasi langsung, yang bertujuan untuk membantu pihak tertentu dalam pengambilan keputusan, atau pemecahan masalah.

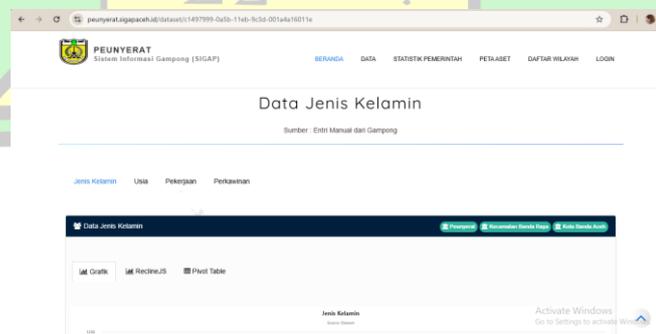
Hadirnya website SIGAP menjadi langkah inovatif dalam memberikan kemudahan informasi yang relevan dan terintegrasi bagi masyarakat. Website ini menyediakan berbagai data dan informasi penting yang mencakup bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga penganggaran di tingkat gampong. Dengan adanya website ini, masyarakat dapat dengan mudah memantau perkembangan gampong mereka, memperoleh layanan yang transparan, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung kemajuan daerah secara lebih efektif.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Operator Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan “data apa saja yang tersedia di SIGAP dan harus selalu diperbarui di SIGAP, menyatakan bahwa:

Untuk saat ini, data yang ada di SIGAP dan harus diperbarui ada empat jenis data utama, yaitu data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, dan data bantuan sosial. Keempat data ini sangat penting karena menjadi dasar untuk berbagai program pelayanan dan pembangunan di tingkat gampong⁴⁰.

Dalam penelitian ini, berfokus pada penyediaan informasi Gampong Peunyeurat melalui SIGAP yang mencakup berbagai dokumen dan data yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Informasi yang disediakan meliputi:

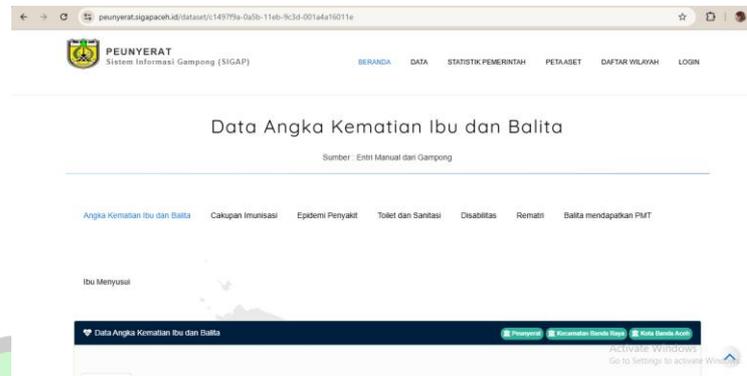
- Kependudukan, yaitu data penduduk yang berupa jenis kelamin penduduk, usia, pekerjaan, dan data perkawinan.



Gambar 4.3 Data Penduduk SIGAP Gampong Peunyeurat

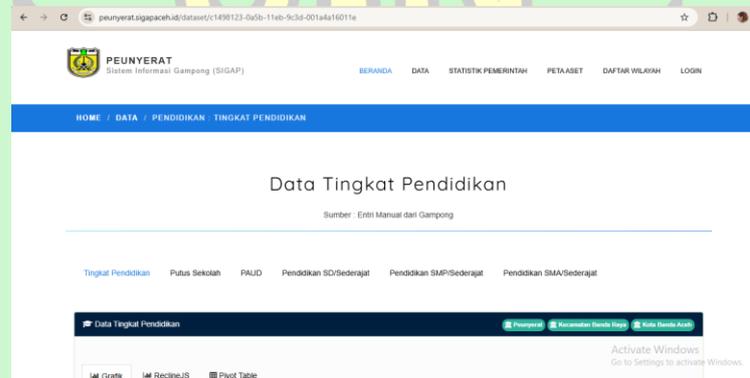
⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Aril selaku Operator Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

- Kesehatan, yaitu data angka kematian ibu dan balita, cakupan imunisasi, epidemi penyakit, toilet dan sanitasi, disabilitas, rematri, balita mendapatkan PMT, Ibu menyusui.



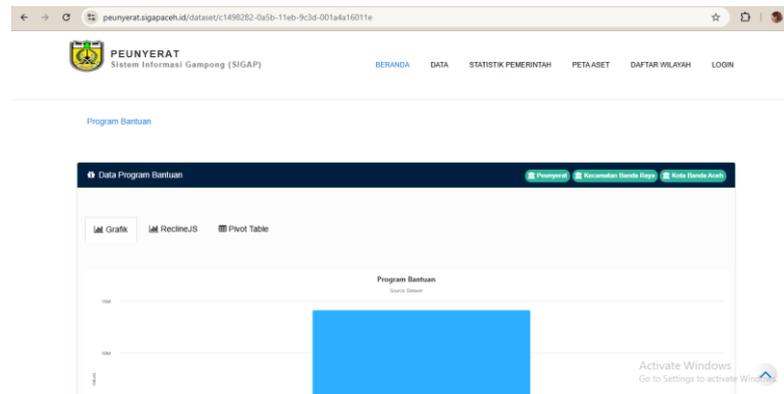
Gambar 4. 4 Data Kesehatan SIGAP Gampong Peunyerat

- Pendidikan, yaitu data Tingkat Pendidikan, Putus Sekolah, PAUD, Pendidikan SD/Sederajat, Pendidikan SMP/Sederajat, Pendidikan SMA/Sederajat.



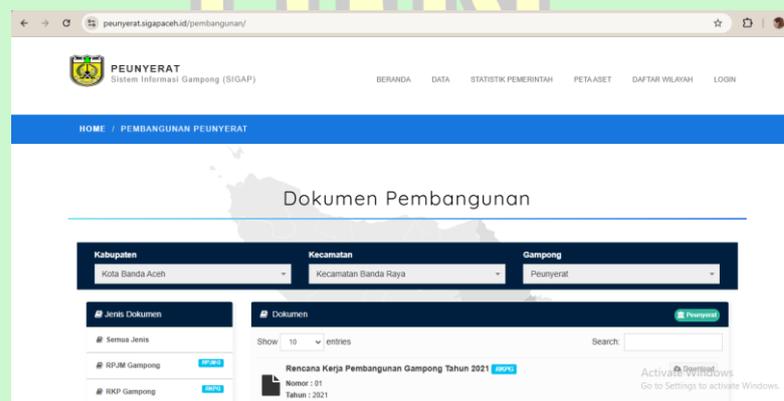
Gambar 4. 5 Data Pendidikan SIGAP Gampong Peunyerat

- Bantuan, yaitu data program bantuan yang diselenggarakan oleh Gampong Peunyerat.



Gambar 4. 6 Data Bantuan SIGAP Gampong Peunyerat

- Dokumen Pembangunan, yaitu data pembangunan Gampong yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Rencana Kerja Pembangunan Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan lainnya.



Gambar 4. 7 Dokumen Pembangunan SIGAP Gampong Peunyerat

- Regulasi, yaitu berupa aturan-aturan yang berlaku di Gampong Peunyerat seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Walikota, Qanun, Reusam dan lainnya.

| No. | Jenis | Nomor | Tahun | Deskripsi | File |
|-----|--------|-------|-------|---|----------|
| 1. | REUSAM | | 2022 | Pemerintah Gampong Peunyeurat Nomor Tahun 2022 tentang Rancangan Reusam Anak Usia Dini (PAUD) | Download |
| 2. | REUSAM | 04 | 2022 | Rancangan Reusam Gampong Peunyeurat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2022 | |

Gambar 4. 8 Data Regulasi SIGAP Gampong Peunyeurat

Berdasarkan informasi yang tersedia di website, pihak perangkat gampong berkomitmen untuk memastikan keakuratan data yang disediakan melalui SIGAP. Setiap data yang dipublikasikan, baik itu terkait dengan kependudukan, program pembangunan, bantuan sosial, atau regulasi, tidak hanya diperbarui secara berkala, tetapi juga divalidasi dengan teliti oleh perangkat Gampong yang memiliki tanggung jawab di bidang masing-masing. Adapun hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Sekretaris Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan bagaimana memastikan keakuratan data SIGAP, menyatakan bahwa:

Untuk memastikan keakuratan data SIGAP di Gampong Peunyeurat, kami memperbarui data secara rutin, seperti setiap tiga bulan sekali untuk data kependudukan dan saat ada perubahan kebijakan. Perangkat Gampong juga terlibat dalam memverifikasi data di lapangan. Jika ada ketidaksesuaian, data akan diperbaiki sebelum dipublikasikan. Selain itu, kami aktif menerima masukan dari masyarakat untuk memastikan bahwa informasi di SIGAP sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata⁴¹.

Dalam hal ini, penyediaan informasi publik di tingkat Gampong tentu memerlukan kebijakan yang jelas untuk memastikan proses penyampaian informasi berjalan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. SOP ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah gampong dalam mengelola, menyusun, dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, pengambilan keputusan terkait penyediaan informasi juga harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti validitas data, kerahasiaan informasi, serta relevansi informasi bagi masyarakat. Dengan

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik selaku Sekretaris Gampong, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025 .

adanya SOP yang baik dan pengambilan keputusan yang matang, pemerintah gampong dapat menjamin akses masyarakat terhadap informasi publik yang transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Peunyeurat berkenaan dengan, apakah desa memiliki kebijakan atau SOP khusus terkait pengelolaan informasi, menyatakan bahwa:

Desa kami memiliki kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait pengelolaan informasi publik. Kebijakan berdasarkan Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2021 yang dimana dalam peraturan tersebut ada prosedur-prosedur terkait proses pengelolaan informasi, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga penyebaran informasi kepada masyarakat, dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel⁴².

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Penyediaan informasi publik di Gampong Peunyeurat melalui SIGAP mendukung pelayanan masyarakat dan pembangunan. Informasi yang disajikan mencakup data kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dokumen pembangunan, dan regulasi. Data diperbarui secara berkala, diverifikasi di lapangan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Gampong Peunyeurat telah menerapkan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2021 untuk memastikan pengelolaan informasi dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Dengan komitmen ini, informasi yang disajikan bersifat valid, relevan, dan mendukung pelayanan publik yang transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.2.1.2 Kemudahan Akses

Kemudahan akses menjadi faktor penting dalam mengukur keberhasilan SIGAP sebagai sarana transparansi informasi. Penelitian menunjukkan bahwa SIGAP dirancang untuk dapat diakses melalui perangkat komputer dan ponsel. Antarmuka yang sederhana memungkinkan masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah untuk tetap dapat menggunakan sistem ini dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah gampong karena adanya transparansi melalui SIGAP. Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan masyarakat Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak T. Ismed Fadhillah, A.Md., selaku Keuchik Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

apakah informasi yang disampaikan melalui SIGAP sudah jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, menyatakan bahwa:

SIGAP salah satu website yang berguna bagi masyarakat, apabila aparatur gampongnya mengelola dengan baik, jadi kita pun dapat mengakses data-data gampong dengan mudah tanpa harus datang ke kantor keuchik. contoh kaya kita mau lihat tentang penggunaan anggaran desa, sekarang bisa langsung kita buka di SIGAP dan langsung terlihat table-tabel penggunaan anggaran tersebut ⁴³.

Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaan SIGAP, salah satunya adalah kurangnya pemahaman sebagian warga mengenai cara mengakses informasi secara mandiri. Hal ini terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, khususnya para lansia. Adapun hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Sekretaris Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan hambatan dalam implementasi SIGAP, menyatakan bahwa:

Walaupun kita sudah memaksimalkan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, namun tetap ada tantangan yang harus kita maklumi bersama. Seperti kurangnya pemahaman warga dalam menggunakan internet, itu biasanya bagi orang tua. Dalam hal ini kita mengajak para anak muda untuk mensosialisasi para kaum tua dalam mengakses informasi gampong, kalau memang tidak bisa juga, kita suruh mereka bantu akses untuk diperlihatkan kepada para orang tua yang kurang paham teknologi ⁴⁴.

Sekretaris Gampong menambahkan, bahwa:

Gampong Peunyeurat menjadikan pemuda sebagai solusi dalam masalah ini. Mereka diharapkan dapat membantu warga lain yang kurang paham teknologi untuk mengakses informasi Gampong Peunyeurat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan kemudahan akses merupakan faktor penting dalam keberhasilan SIGAP sebagai sarana transparansi informasi. SIGAP dirancang agar mudah diakses melalui perangkat komputer dan ponsel dengan antarmuka sederhana yang memudahkan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki tingkat literasi digital rendah. Hal ini telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong melalui transparansi data, seperti penggunaan anggaran gampong. Namun, tantangan masih ada, terutama kurangnya pemahaman

⁴³ Hasil Wawancara dengan Ibu Elina selaku Masyarakat Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik selaku Sekretaris Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

sebagian warga, khususnya lansia, dalam mengakses informasi secara mandiri. Untuk mengatasi hal ini, Gampong Peunyeurat melibatkan pemuda sebagai solusi. Mereka diharapkan membantu mensosialisasikan SIGAP kepada kelompok yang kurang familiar dengan teknologi atau secara langsung membantu mereka mengakses informasi yang dibutuhkan.

4.2.1.3 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Gampong Peunyeurat. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses informasi terkait kegiatan Pemerintah Gampong. SIGAP diharapkan mampu meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap aktivitas pemerintahan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Keuchik Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan apakah di Gampong Peunyeurat telah menerapkan SIGAP, menyatakan bahwa:

Iya, Gampong Peunyeurat telah menerapkan SIGAP mulai dari tahun 2021 yang dimana sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. SIGAP memungkinkan kami untuk mengelola dan menyediakan berbagai informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti data kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta informasi terkait pembangunan dan regulasi desa⁴⁵.

Melalui SIGAP, dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat gampong peunyeurat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan sistem ini juga bisa memastikan bahwa data yang disediakan selalu terupdate dan akurat. Ini sejalan dengan komitmen untuk mendukung keterbukaan informasi publik yang transparan. SIGAP juga mempermudah masyarakat untuk memastikan bahwa segala proses administrasi dan bantuan sosial dapat dipantau secara terbuka.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Ismed Fadhillah, A.Md, selaku Keuchik Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Operator Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan bagaimana pengumpulan dan pembaharuan data SIGAP di Gampong Peunyeurat, menyatakan bahwa:

Di SIGAP ini terdapat beberapa data-data Gampong Peunyeurat seperti, data penduduk, data kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat perekonomian masyarakat, dokumen pembangunan dan anggaran gampong dan aturan-aturan yang berlaku di Gampong Peunyeurat. Data-data ini saya perbarui manual secara berkala, biasanya saya update dalam jangka waktu bulanan. Hal ini kita lakukan agar masyarakat dapat mengakses data terbaru melalui website ⁴⁶.

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh informan, SIGAP berhasil menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait program dan kebijakan secara terbuka. Pemerintah gampong, melalui SIGAP, menyajikan berbagai data penting seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan, dokumen pembangunan dan regulasi yang ada di Gampong Peunyeurat. Informasi ini diunggah secara berkala oleh operator gampong dan dapat diakses oleh masyarakat.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan SIGAP, salah satunya adalah kurangnya pemahaman sebagian warga mengenai cara mengakses informasi secara mandiri. Hal ini terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, khususnya para lansia. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar seluruh masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan SIGAP secara optimal. Selain itu, guna menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan masyarakat Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan bagaimana solusi yang harus diberikan Perangkat Gampong untuk SIGAP ini lebih familiar di masyarakat, menyatakan bahwa:

Menurut kami, Gampong Peunyeurat perlu menyediakan informasi dalam bentuk media cetak yang dipasang di baliho-baliho di lokasi strategis gampong. Dengan hal tersebut diharapkan dapat melengkapi penyampaian informasi digital melalui SIGAP dan memastikan seluruh warga mendapatkan informasi secara merata ⁴⁷.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Aril selaku Operator Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal selaku Masyarakat Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat merupakan langkah penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintahan. SIGAP memfasilitasi penyediaan berbagai informasi penting, seperti data kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dokumen pembangunan, dan regulasi desa, yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang, serta memberikan kontrol yang lebih besar terhadap aktivitas pemerintahan. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait dengan pemahaman sebagian warga, terutama kelompok lansia, tentang cara mengakses informasi melalui platform digital. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan alternatif media informasi, seperti pemasangan baliho atau media cetak di lokasi strategis, agar informasi dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan SIGAP dapat lebih familiar dan bermanfaat bagi seluruh warga Gampong Peunyeurat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan terkait mekanisme penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi public, bahwa pelaksanaan SIGAP di Gampong Peunyeurat sudah terlaksana secara konsisten berdasarkan PERGUB No 33 Tahun 2021 Tentang SIGAP, akan tetapi terus dalam hal ini masih terus membutuhkan pembinaan lebih lanjut dari pihak yang berkompeten terutama dari DPMG Aceh untuk terciptanya konsistensi data secara akurat, transparansi dan berkelanjutan sehingga mampu mendeskripsikan diri bagi masing-masing Gampong yang sudah melaksanakan SIGAP oleh aparatur nya dan masyarakatnya.

4.2.2 Mekanisme Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik di Gampong Kuta Alam

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis indikator-indikator yang berhubungan dan mempengaruhi mekanisme penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk memperoleh gambaran dan fakta yang menyeluruh di lapangan mengenai mekanisme penerapan SIGAP di Gampong Kuta Alam. Selanjutnya, peneliti menjelaskan indikator penelitian untuk

mengetahui tanggapan informan atau persepsi narasumber atas penerapan SIGAP. Pada penelitian ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu penyediaan informasi, kemudahan akses dan keterbukaan informasi publik.

4.2.2.1 Penyediaan Informasi

Penyediaan informasi secara umum merujuk pada proses pemberian akses atau penyajian data, fakta, dan pengetahuan yang relevan serta berguna bagi pihak yang membutuhkan. Informasi yang disediakan dapat berupa berbagai bentuk, seperti dokumen, laporan, data elektronik, atau komunikasi langsung. Berdasarkan hasil penelitian, Gampong Kuta Alam sudah menerapkan SIGAP, namun SIGAP Gampong Kuta Alam belum diperbaharui. Sampai saat ini di website masih ada data yang di input terakhir pada tahun 2023.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Keuchik Gampong Kuta Alam yang berkenaan dengan apakah Gampong Kuta Alam telah menerapkan SIGAP, menyatakan bahwa:

Menurut saya, SIGAP itu sebenarnya merupakan program yang sangat baik yang dibuatkan oleh Pemerintah untuk mendukung transparansi informasi di tingkat gampong. Namun, saat akhir-akhir ini kami belum bisa menerapkan SIGAP secara maksimal di Gampong Kuta Alam, karena penerapan SIGAP ini sata rasa belum sepenuhnya efektif. Selain itu kita sekarang lebih fokus pada website yang diberikan Pemkot Banda Aceh. Karena sebelum SIGAP ada, kita sudah familiar dengan website ini dan merasa systemnya juga sudah efektif untuk digunakan. Kemudian operator kami tidak perlu memulai dari awal lagi dengan hadirnya SIGAP dan tidak kerja dua kali juga ⁴⁸.

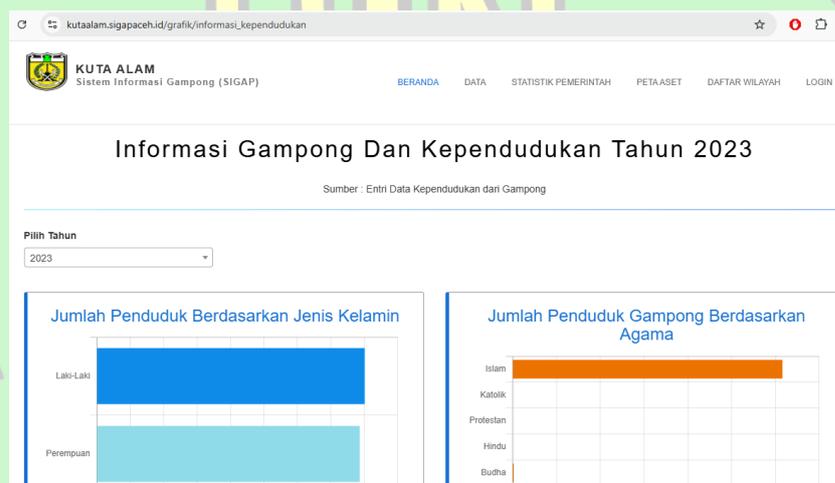
Alasan Gampong Kuta Alam tidak memperbaharui SIGAP, menurut Keuchik Gampong Kuta Alam, adalah karena sistem SIGAP dinilai belum sepenuhnya efektif untuk digunakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala teknis, termasuk kekuatan dan stabilitas sistem yang masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung kebutuhan operasional secara optimal. Keuchik juga menambahkan bahwa Gampong Kuta Alam saat ini lebih fokus menggunakan website yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang dianggap lebih efektif dalam penerapan transparansi informasi publik, sehingga

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dwi Julianti Indah, S.T, selaku Keuchik Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

implementasi SIGAP saat ini tidak menjadi prioritas di Gampong Kuta Alam untuk penerapan transparansi informasi publik. Selain itu, Gampong Kuta Alam juga merasa informasi yang akan ditampilkan di website juga sama dengan website yang telah mereka gunakan sekarang, dan operator yang mengelola juga sudah lebih memahami website tersebut.

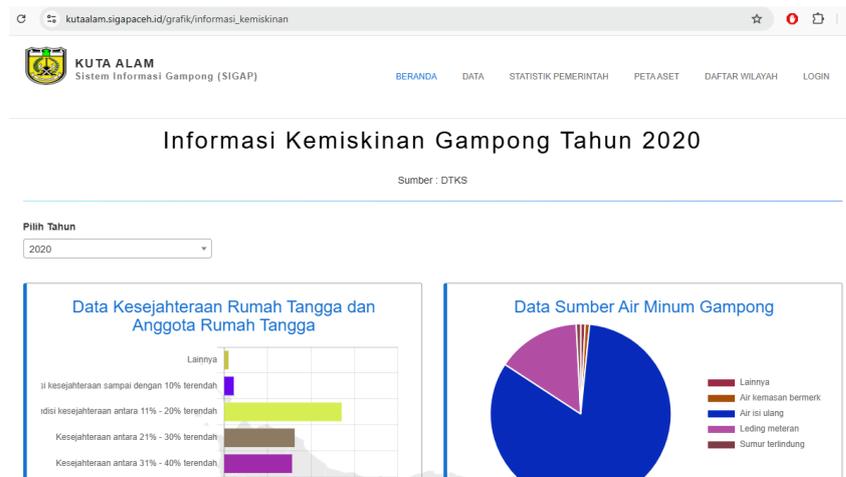
Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya perbaharuan data yang tersedia dalam SIGAP, yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat.

- Informasi Gampong dan Kependudukan, Penyediaan informasi kependudukan yang akurat dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah gampong dapat disesuaikan dengan kebutuhan warganya. Namun, Gampong Kuta Alam hingga saat ini belum mengunggah data kependudukan yang terbaru ke dalam sistem.



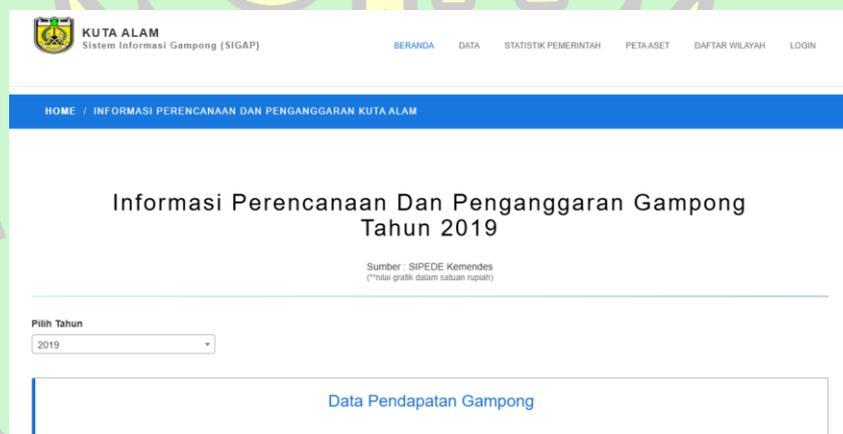
Gambar 4. 9 Data Informasi Gampong dan Kependudukan Tahun 2024

- Informasi Kemiskinan Gampong, penting untuk merencanakan program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Data ini mencakup jumlah keluarga miskin, akses layanan dasar, dan kondisi ekonomi masyarakat.



Gambar 4. 10 Data Informasi Kemiskinan Gampong Tahun 2019

- Informasi Perencanaan dan Penganggaran Gampong, untuk memastikan transparansi penggunaan dana desa dan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan masyarakat. Data ini meliputi alokasi dana untuk program pembangunan, kegiatan sosial, dan prioritas gampong.



Gambar 4. 11 Data Informasi Perencanaan dan Penganggaran Gampong

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Operator Gampong Kuta Alam yang berkenaan dengan bagaimana cara mengumpulkan data dan memperbaharui data di Gampong, menyatakan bahwa:

Gampong Kuta Alam belum menerapkan SIGAP dengan maksimal sebagai sistem informasi gampong, jadi tidak ada data terbaru yang diperbarui atau tersedia melalui website tersebut. Sebagai gantinya, untuk keperluan informasi dan data, Gampong Kuta Alam menggunakan wensite yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Di website tersebut mencakup berbagai informasi penting yang

terbaru, seperti data kependudukan, yang kemudian digunakan untuk mendukung administrasi gampong serta pelaksanaan program-program yang ada. Jadi setiap ada data terbaru yang saya dapatkan dari perangkat desa disini, saya akan mengupdate nya di website pemkot tersebut ⁴⁹.

Dengan demikian, Gampong Kuta Alam juga telah menerapkan transparasi informasi publik. Yang membedakannya, Gampong Kuta Alam lebih memprioritaskan menggunakan *website* yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada *website* yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut, data dan informasi yang tersedia lebih *update*. Bahkan pada *website* yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh ini, informasi dan data dari Gampong Kuta Alam di kelola dan diperbaharui dengan sangat baik oleh operator gampong.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Sekretaris Gampong Kuta Alam yang berkenaan dengan bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi terkait Gampong, menyatakan bahwa:

Ada beberapa data yang tidak bisa kita buka secara umum di media, seperti data pribadi masyarakat kita. Jadi untuk mendapatkan data tersebut, masyarakat dapat memperolehnya dengan mengunjungi kantor Gampong secara langsung. Hal ini kita lakukan untuk menjaga privasi masyarakat kita. Untuk data-data lain yang boleh di akses publik, kita akan update di website yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada awal-awal penerapan SIGAP, kita pernah memperbaharuinya di website SIGAP. Tetap karena menurut kami lebih efektif di website yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, maka setelah itu kami sudah tidak menggunakan lagi SIGAP. Karena pada dasar penerapan dan tujuannya juga sama-sama untuk menerapkan transparasi informasi publik. Hanya kita menggunakan media yang berbeda saja ⁵⁰.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Gampong Kuta Alam sudah menerapkan transparasi informasi public. Yang membedakannya mereka menggunakan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebelum hadirnya SIGAP. Pada penerapannya, informasi dan data dapat di akses oleh masyarakat di website tersebut seperti website SIGAP. Beberapa informasi penting, seperti data kependudukan, kemiskinan, dan perencanaan anggaran.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri selaku Operator Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Fadil selaku Sekretaris Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

4.2.2.2 Kemudahan Akses

Kemudahan akses merupakan salah satu faktor utama dalam menilai sejauh mana keberhasilan SIGAP sebagai sarana transparansi informasi di tingkat gampong. Sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait pemerintahan gampong secara cepat dan efisien. Dengan adanya fleksibilitas akses, masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, baik melalui perangkat komputer maupun ponsel pintar. Meskipun SIGAP dirancang dengan fitur kemudahan akses yang unggul, realitanya di Gampong Kuta Alam masih menggunakan sistem lama yang disediakan oleh pemerintahan kota.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan masyarakat Gampong Kuta Alam berkenaan dengan apakah masyarakat dapat mengakses SIGAP untuk memperoleh informasi terkait Gampong, menyatakan bahwa:

Sejauh ini kami sangat terbantu dengan ada transparansi informasi public di website gampong Kuta Alam. Tapi untuk SIGAP kami belum sepenuhnya memahami. Karena memang dari sebelumnya website di Gampong Kuta Alam ini sudah aktif dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Jadi kami sebagai masyarakat tidak keberatan terkait apapun system yang dipakai oleh pemerintah gampong, yang penting tujuannya tetap sama untuk meningkatkan transparansi informasi publik. Mungkin kedepan Pemerintah Gampong Kuta Alam dapat mempelajari SIGAP dan lebih memprioritaskan SIGAP, agar bisa korelasi juga dengan gampong-gampong lain untuk memberikan informasi publik⁵¹.

Dalam hal ini, masyarakat Gampong Kuta Alam tidak memperlmasalahkan terkait system yang dipakai oleh pemerintah gampong mereka, asalkan tujuan yang ingin di capai tetap sama untuk meningkatkan transparansi informasi public. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, pemerintah Gampong Kuta Alam sangat memperhatikan pelayanan public untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi public. Dalam wawancara tersebut, masyarakat gampong Kuta Alam juga berharap agar pemerintah gampong kedepan dapat memprioritaskan penerapan SIGAP, karena ini juga website yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, agar penerapan informasi publik di gampong Kuta Alam juga sama dengan penerapan di Gampong lain.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Widya selaku Masyarakat Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong yang berkenaan dengan bagaimana perangkat gampong membantu masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki kesibukan sehingga jika memerlukan informasi gampong tidak bisa atau tidak sempat mendatangi kantor keuchik, untuk mendapatkan informasi gampong, menyatakan bahwa:

Perangkat gampong memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki waktu luang untuk datang langsung ke kantor keuchik saat membutuhkan informasi. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan kemudahan akses melalui beberapa website yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tersebut. Jadi masyarakat kita pun juga akan terbantu dengan website tersebut, terutama dalam mengakses informasi public. Selain itu, kita juga punya grup whatsapp gampong, yang mana grup ini kita gunakan untuk memberikan informasi yang bersifat khusus untuk masyarakat kita⁵².

Meskipun grup WhatsApp gampong menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi dengan cepat, pertanyaan mengenai keakuratan informasi yang dibagikan melalui platform ini tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ketika informasi hanya disebarluaskan melalui pesan teks, tanpa adanya verifikasi atau konfirmasi yang jelas, potensi terjadinya kesalahan atau penyebaran informasi yang tidak akurat bisa meningkat. Misalnya, adanya miskomunikasi, atau bahkan penyebaran informasi yang tidak lengkap dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang suatu kebijakan atau program pemerintah.

Oleh karena itu, dalam hal penyampaian informasi public, perangkat gampong mengandalkan website yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi masyarakat dapat mengakses informasi resmi dari website tersebut tanpa harus mendatangi kantor gampong secara langsung.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Operator Gampong yang berkenaan dengan bagaimana memastikan keakuratan data, menyatakan bahwa:

Untuk memastikan keakuratan data, kami melakukan beberapa langkah penting. Pertama, setiap data yang kami terima atau perbarui, baik itu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atau sumber lain, kami verifikasi terlebih dahulu. Kami tidak hanya mengandalkan data mentah, tetapi juga memeriksa kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Misalnya, untuk data kependudukan, kami melakukan pengecekan langsung ke rumah warga jika ada

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadil selaku Sekretaris Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

perubahan atau pembaruan data yang perlu dilakukan. Kami juga mengedepankan transparansi dengan mengizinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan jika ada ketidaksesuaian data yang ditemukan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengecekan dan pembaruan data, kami berharap dapat memastikan keakuratan informasi yang kami sampaikan melalui sistem atau media lainnya⁵³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun SIGAP dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi informasi dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat gampong, pada kenyataannya sistem ini belum di prioritaskan pemerintah di Gampong Kuta Alam. Akan tetapi, pemerintah gampong Kuta Alam tetap memperhatikan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dengan menggunakan system informasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan, walaupun pengelolaan SIGAP di Gampong Kuta Alam belum berjalan secara maksimal dan tetapi pemerintah gampong tetap memperhatikan transparansi pelayanan informasi public dengan media yang lain.

4.2.2.3 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi hal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Gampong. Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi yang transparan dan akurat terkait berbagai kegiatan dan kebijakan pemerintah gampong.

Penerapan SIGAP diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang, seperti pengelolaan anggaran atau pelaksanaan program yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, SIGAP juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas pemerintahan. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat secara langsung mengawasi penggunaan dana desa, pelaksanaan proyek pembangunan, dan distribusi bantuan sosial. Namun demikian, penerapan SIGAP tidak selalu berjalan mulus di semua gampong. Gampong Kuta Alam hingga saat ini belum memprioritaskan penggunaan SIGAP sebagai sistem informasi utama.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri selaku Operator Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

Dilanjutkan dengan pernyataan terkait bagaimana masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait gampong:

Jika masyarakat ingin mendapatkan informasi terkait kegiatan atau program di gampong, kami tidak mengakses di SIGAP. Tetap kami mengakses di website lain milik gampong Kuta Alam yang memang sudah lama aktif dan lebih efektif. Mungkin jika kedepan SIGAP sudah familiar di gampong-gampong lain, saya rasa pemerintah Kuta Alam juga tidak boleh ketinggalan, agar penerapan SIGAP ini merata di setiap gampong yang ada terutama di Kota Banda Aceh⁵⁴.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa, masyarakat mendapatkan informasi terkait berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan gampong di website yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, mereka sudah terbiasa dengan website tersebut karena system tersebut sudah lebih awal hadir daripada SIGAP. Dikarenakan Gampong Kuta Alam tidak memprioritaskan SIGAP sebagai sistem informasi terintegrasi, maka tidak ada data terbaru yang diperbarui pada platform tersebut. Sebagai gantinya, untuk keperluan pembaruan data, Gampong Kuta Alam mengandalkan website lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Data tersebut mencakup berbagai informasi penting, seperti data kependudukan, yang kemudian digunakan untuk mendukung administrasi gampong serta pelaksanaan program-program yang ada. Dengan memanfaatkan data dari Disdukcapil, Gampong Kuta Alam tetap berupaya memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan tetap relevan dan akurat, meskipun belum sepenuhnya memanfaatkan SIGAP sebagai platform pengelolaan informasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait mekanisme penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik, bahwa pelaksanaan SIGAP Gampong Kuta Alam belum mengelola SIGAP secara optimal, sehingga informasi penting seperti data kependudukan, kemiskinan, dan perencanaan anggaran belum dapat diakses masyarakat melalui platform tersebut. Masyarakat masih bergantung pada system lama, yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Keakuratan data yang dibagikan harus diverifikasi manual karena tidak terintegrasi langsung dengan data dari pemerintah.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadil selaku Sekretaris Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

Perangkat gampong mengandalkan data dari Disdukcapil untuk pembaruan, namun tidak terintegrasi dalam SIGAP.

4.2.3 Strategi Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik Di Gampong Peunyeurat

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis indikator-indikator yang berhubungan dan mempengaruhi strategi penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh untuk memperoleh gambaran dan fakta yang menyeluruh di lapangan mengenai strategi penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Peunyeurat. Selanjutnya, peneliti menjelaskan indikator penelitian untuk mengetahui tanggapan atau persepsi informan atas narasumber penerapan SIGAP. Pada penelitian ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu tujuan (*purposes*), pengarahan (*direction*) dan tindakan (*action*).

4.2.3.1 Tujuan (*Purposes*)

Penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat dirancang dengan relevansi tinggi terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan transparansi informasi publik. Gampong Peunyeurat berhasil menyediakan akses informasi secara terbuka terkait kebijakan, data kependudukan, bantuan sosial, dan program pembangunan melalui SIGAP sebagaimana tujuan dari adanya SIGAP

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Keuchik Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan langkah apa saja yang dilakukan dalam menerapkan SIGAP di Gampong Peunyeurat, menyatakan bahwa:

Dalam menerapkan SIGAP di Gampong Peunyeurat, berbagai langkah strategis telah kami lakukan guna memastikan sistem ini berjalan optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah awal adalah sosialisasi melalui pertemuan warga dan komunikasi dengan kepala dusun untuk mengenalkan manfaat SIGAP dalam transparansi informasi publik. Pelatihan bagi perangkat Gampong juga dilakukan untuk memastikan kemampuan mereka dalam mengelola sistem, memutakhirkan data, dan memberikan dukungan teknis kepada warga dengan menyediakan infrastruktur seperti komputer, jaringan internet untuk mendukung operasional. Pemutakhiran data menjadi prioritas, sehingga informasi seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan program pembangunan selalu akurat.

Partisipasi masyarakat juga didorong melalui jalur komunikasi dengan perangkat gampong untuk menampung masukan dan kebutuhan informasi ⁵⁵.

Dilanjutkan dengan pernyataan terkait apakah SIGAP sudah memenuhi harapan masyarakat terkait informasi publik:

Ya, sejauh ini SIGAP telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat terkait dengan informasi publik. Kami telah melihat respon positif dari warga yang merasa lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi yang sebelumnya sulit didapatkan. Melalui SIGAP, mereka bisa mendapatkan informasi terkini mengenai data kependudukan, kesehatan, Pendidikan, program pembangunan, bantuan sosial, regulasi, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gampong dan dalam meningkatkan pengetahuannya keterbukaan informasi publik oleh masyarakat, pada bulan April tahun lalu Gampong Peunyeurat mengadakan kegiatan workshop tentang keterbukaan informasi publik.



Gambar 4. 12 Kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi di Gampong Peunyeurat

Kegiatan Workshop ini dibuat dengan tujuan pentingnya keterbukaan informasi publik, Pemerintah Gampong Peunyeurat memberikan workshop keterbukaan informasi publik dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur gampong tentang hak atas informasi, memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan demi terwujudnya

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Ismed Fadhillah, A.Md, selaku Keuchik Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

pembangunan yang inklusif dan akuntabel. Keuchik Gampong Peunyeurat, T. Ismed Fadhillah, menyatakan:

Kami meyakini bahwa keterbukaan informasi publik adalah langkah penting untuk mewujudkan transparansi sekaligus menjadi pondasi kokoh bagi pemerintahan yang baik dan kredibel. Partisipasi aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui saran, masukan, serta keterlibatan langsung dalam proses pembangunan⁵⁶.

Dalam hal ini, tentu masyarakat juga memiliki harapan untuk ke depannya terkait penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat. Sebagaimana pernyataan dari salah satu masyarakat Gampong Peunyeurat terkait harapan terkait penerapan SIGAP untuk ke depannya, mengatakan:

Sebagai masyarakat Gampong Peunyeurat, kami berharap penerapan SIGAP dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas. Salah satu harapan utama kami adalah agar akses informasi menjadi lebih mudah bagi semua kalangan, termasuk mereka yang kurang memahami teknologi. Selain itu, kami juga berharap data yang disediakan melalui SIGAP selalu update. Kami ingin informasi tentang bantuan sosial, program pembangunan, dan kegiatan gampong selalu transparan dan cepat diakses. Hal ini penting untuk memastikan kami sebagai warga tetap mengetahui perkembangan di gampong dan bisa memberikan masukan jika diperlukan⁵⁷.

Namun, dalam penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama lansia, yang kesulitan mengakses informasi secara online. Selain itu, perangkat Gampong membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk mengelola SIGAP secara efektif. Meskipun sudah ada sosialisasi, banyak warga yang belum sepenuhnya memahami cara mengakses SIGAP, sehingga perlu sosialisasi yang lebih intensif. Tantangan lain adalah pemutakhiran data yang terhambat oleh keterbatasan sumber daya, serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Gampong Peunyeurat telah merencanakan beberapa langkah pengembangan SIGAP di masa depan. Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Keuchik Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Ismed Fadhillah, A.Md, selaku Keuchik Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti selaku Masyarakat Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

rencana pengembangan SIGAP di masa depan di Gampong Peunyeurat, menyatakan bahwa:

Rencana pengembangan SIGAP di masa depan meliputi beberapa langkah strategis. Kami akan meningkatkan infrastruktur teknologi, seperti memperbaiki jaringan internet agar akses ke SIGAP lebih lancar. Selain itu, kami berencana untuk mengadakan pelatihan lebih rutin bagi perangkat Gampong dan masyarakat agar mereka lebih familiar dengan penggunaan SIGAP. Kami akan mengajukan pembaruan versi SIGAP oleh DPMG Aceh untuk menambah jenis informasi yang tersedia, seperti laporan anggaran dan evaluasi program, untuk meningkatkan transparansi. Semua ini bertujuan agar SIGAP semakin efektif dan mudah diakses oleh seluruh warga⁵⁸.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat dirancang untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat, mencakup data kependudukan, program pembangunan, bantuan sosial, serta regulasi. Pemerintah Gampong telah melaksanakan berbagai langkah strategis, seperti sosialisasi, pelatihan perangkat, pemutakhiran data berkala, penyediaan infrastruktur teknologi, dan mendorong partisipasi masyarakat. SIGAP juga telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat, terbukti dengan kemudahan akses informasi yang dirasakan oleh warga. Namun, penerapan SIGAP tidak lepas dari tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan partisipasi warga yang masih terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah gampong merencanakan pengembangan SIGAP di masa depan, termasuk peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan rutin bagi perangkat dan masyarakat, pembaruan sistem SIGAP, serta perluasan informasi yang tersedia. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan Gampong.

4.2.3.2 Pengarahan (*direction*)

Penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi publik dengan memberikan pengarahan yang strategis kepada masyarakat dan perangkat gampong. Pengarahan dilakukan melalui beberapa langkah utama, dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan warga dan

⁵⁸ “Hasil Wawancara dengan Bapak T. Ismed Fadhillah, A.Md, selaku Keuchik Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

diskusi dengan kepala dusun. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik serta manfaat SIGAP sebagai sarana untuk mengakses berbagai data, seperti data kependudukan, data Kesehatan, Tingkat pendidikan masyarakat, tingkat perekonomian masyarakat, program pembangunan dan regulasi Gampong.

Selain itu, perangkat gampong diberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola SIGAP, termasuk pembaharuan data dan memberikan dukungan teknis kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Operator Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan apakah ada pelatihan atau panduan khusus untuk mengoperasikan SIGAP di Gampong Peunyeurat, menyatakan bahwa:

Ya, di Gampong Peunyeurat, kami telah mendapatkan pelatihan sigap dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh yang terlibat dalam pengelolaan SIGAP. Pelatihan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua perangkat gampong, termasuk saya sebagai operator, dapat mengoperasikan SIGAP dengan baik. Dalam pelatihan SIGAP diajarkan mulai dari cara memasukkan dan memperbarui data, mengelola informasi yang masuk, hingga memverifikasi keakuratan data yang dipublikasikan di sistem. Selain itu, kami juga dilengkapi dengan panduan manual yang berisi langkah-langkah teknis dan petunjuk dalam menggunakan SIGAP⁵⁹.

Dalam pengelolaan SIGAP terdapat beberapa pihak yang terlibat secara langsung untuk memastikan sistem ini berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang dimana Sekretaris Gampong Peunyeurat menyampaikan bahwa yang terlibat dalam pengelolaan SIGAP Gampong Peunyeurat, yaitu:

Dalam pengelolaan SIGAP di Gampong Peunyeurat, beberapa pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan, di antaranya adalah Sekretaris Gampong, Operator Gampong, Kepala Seksi Pemerintahan serta masyarakat, sebagai sekretaris gampong, saya bersama dengan keuchik dan perangkat desa lainnya memiliki peran penting dalam pengelolaan SIGAP. Kami bertanggung jawab untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik, mulai dari pembaharuan data hingga memastikan informasi yang disediakan akurat dan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memainkan peran penting, terutama dalam memberikan masukan dan feedback terkait informasi yang mereka

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aril selaku Operator Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

butuhkan. Partisipasi mereka sangat penting untuk memastikan bahwa SIGAP benar-benar mencakup segala kebutuhan informasi publik yang relevan⁶⁰.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat dirancang untuk meningkatkan transparansi informasi publik melalui serangkaian langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu langkah utama adalah sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan warga dan diskusi dengan kepala dusun. Selain itu, untuk memastikan efektivitas pengelolaan SIGAP, perangkat gampong diberikan pelatihan khusus oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perangkat gampong dalam mengoperasikan SIGAP, mulai dari cara meng-upload dan memperbarui data, mengelola informasi yang masuk, hingga memverifikasi keakuratan data yang dipublikasikan di sistem. Operator gampong dilengkapi dengan panduan manual yang berisi langkah-langkah teknis dalam menggunakan SIGAP, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan memastikan bahwa data yang dipublikasikan di SIGAP selalu akurat dan terkini.

Terkait dengan pengelolaan SIGAP, terdapat berbagai pihak yang terlibat secara langsung untuk memastikan sistem ini berjalan dengan efektif dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat meliputi Sekretaris Gampong, Operator Gampong, Kepala Seksi Pemerintahan, dan masyarakat itu sendiri. Secara keseluruhan, penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat melibatkan kolaborasi yang erat antara perangkat gampong dan masyarakat untuk memastikan transparansi informasi publik tercapai.

4.2.3.3 Tindakan (*action*)

Penerapan SIGAP Gampong Peunyeurat di Gampong Peunyeurat bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi publik melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan tindakan langsung dari perangkat Gampong dan partisipasi masyarakat. Salah satu indikator utama dalam pengukuran keberhasilan penerapan SIGAP adalah tindakan konkret yang dilakukan oleh semua pihak terkait dalam melaksanakan sistem ini yaitu,

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik selaku Sekretaris Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

pembaharuan data secara berkala yang dilakukan oleh Operator gampong, hal ini sebagai bagian dari tindakan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia melalui SIGAP, Gampong Peunyeurat melakukan pembaharuan data secara berkala. Data kependudukan, kesehatan, pendidikan, program pembangunan, dan bantuan sosial selalu diperbarui sesuai dengan perubahan yang terjadi di lapangan. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diakses oleh masyarakat selalu relevan dan dapat dipercaya. Pembaharuan data juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti kepala dusun, untuk memverifikasi dan memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Operator Gampong Peunyeurat yang berkenaan dengan cara memperbarui data SIGAP di Gampong Peunyeurat, menyatakan bahwa:

Saya secara rutin memperbarui data secara manual setiap bulan untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia di SIGAP itu selalu update. Data pembaruan ini kami dapatkan melalui berbagai sumber, termasuk informasi langsung dari masyarakat serta hasil pendataan lapangan. Kami juga berkolaborasi dengan kepala dusun untuk mendapatkan data yang akan diperbarui, untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi yang ada di lapangan, sebelum dipublikasikan di system⁶¹.

Dalam memperbarui data atau mengoperasikan SIGAP, tentu saja operator sering menghadapi berbagai kendala teknis. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah masalah koneksi internet yang tidak stabil, yang dapat memperlambat proses pembaruan data atau bahkan menghambat akses ke sistem. Selain itu, meskipun telah diberikan pelatihan, terkadang operator masih mengalami kesulitan dalam mengelola data yang kompleks atau menghadapi sistem yang memerlukan pembaruan perangkat lunak yang lebih sering. Dalam hal ini Operator Gampong mengatakan bahwa:

Alhamdulillah, sejauh selama proses perbarui data saya tidak mengalami kendala. Proses pembaruan data dapat berjalan dengan lancar berkat upaya kami untuk selalu memantau dan memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem relevan. Namun, meskipun tidak ada masalah dalam proses pembaruan data itu sendiri, kami memang sering menghadapi tantangan teknis, terutama saat melakukan pengunggahan data ke sistem. Salah satu kendala yang paling sering kami temui

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Aril selaku Operator Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

adalah jaringan internet yang tidak stabil, yang terkadang menghambat kecepatan dan kelancaran proses pengunggahan data.

Untuk mengatasi kendala dalam proses pengunggahan data ke sistem SIGAP terdapat beberapa cara salah satunya, yaitu:

Penjadwalan pengunggahan pada waktu yang tepat, kami juga memanfaatkan waktu tertentu ketika jaringan lebih stabil, seperti di luar jam sibuk atau saat penggunaan internet lebih rendah, untuk melakukan pengunggahan data. Dengan cara ini, kami dapat menghindari gangguan yang terjadi akibat tingginya volume pengguna internet pada jam-jam tertentu⁶².

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat telah dilaksanakan dengan strategi yang jelas untuk memastikan transparansi informasi publik. Salah satu langkah penting dalam strategi ini adalah pembaruan data secara berkala oleh Operator Gampong, yang mencakup data kependudukan, kesehatan, pendidikan, program pembangunan, dan bantuan sosial. Pembaruan data ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti kepala dusun, untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang disajikan kepada masyarakat. Meskipun operator mengalami beberapa kendala teknis, terutama terkait dengan koneksi internet yang tidak stabil, mereka tetap berhasil melaksanakan pembaruan data secara rutin. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka menerapkan strategi penjadwalan pengunggahan data pada waktu yang tepat, seperti di luar jam sibuk, guna memastikan kelancaran proses pengunggahan. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh perangkat Gampong untuk mengoptimalkan penerapan SIGAP agar tetap berfungsi efektif dan transparan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait strategi penerapan sigap dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Peunyeurat, bahwa, strategi penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat sudah mencapai bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi publik melalui beberapa langkah strategis. Sosialisasi dan pelatihan bagi perangkat gampong dilakukan untuk memastikan pengelolaan SIGAP berjalan efektif, dengan pembaruan data yang rutin mencakup kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan program pembangunan. Meskipun SIGAP

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Aril selaku Operator Gampong Peunyeurat, Bertempat di Gampong Peunyeurat pada 06 Januari 2025.

telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan koneksi internet yang tidak stabil masih menjadi hambatan. Pemerintah gampong berencana untuk meningkatkan infrastruktur dan memperluas pelatihan guna mengatasi kendala ini dan memperkuat transparansi di masa depan.

4.2.4 Strategi Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik Di Gampong Kuta Alam

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis indikator-indikator yang berhubungan dan mempengaruhi strategi penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk memperoleh gambaran dan fakta yang menyeluruh di lapangan mengenai strategi penerapan SIGAP dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Kuta Alam. Selanjutnya, peneliti menjelaskan indikator penelitian untuk mengetahui tanggapan atau persepsi informan atas narasumber penerapan SIGAP. Pada penelitian ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu tujuan (purposes), pengarahannya (direction) dan tindakan (action).

4.2.4.1 Tujuan (Purposes)

Penerapan SIGAP di Gampong dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi informasi publik dan memastikan masyarakat dapat mengakses berbagai data yang relevan terkait kebijakan, program pembangunan, serta kebutuhan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, Gampong Kuta Alam telah menyediakan akses informasi secara terbuka melalui SIGAP terkait kebijakan, data kependudukan, bantuan sosial, dan program pembangunan. Namun dalam penerapannya, Gampong Kuta Alam tidak lagi memprioritaskan SIGAP sebagai media utama untuk memberikan pelayanan public kepada masyarakat. Sebagai gantinya, Gampong Kuta Alam menggunakan website yang sudah ada yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Walaupun Gampong Kuta Alam sudah memberikan pelayanan public kepada masyarakat dengan media lain, hal ini belum sesuai tujuan utama dari penerapan SIGAP yang seharusnya untuk memberikan transparansi informasi public melalui website SIGAP bagi masyarakat secara langsung, akurat, dan transparan.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan Operator Gampong Kuta Alam yang berkenaan dengan langkah apa saja yang dilakukan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Gampong Kuta Alam, menyatakan bahwa:

Meskipun kami belum sepenuhnya memprioritaskan SIGAP sebagai media untuk menyediakan informasi, kami berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya, dengan menggunakan website yang sudah ada. Menurut saya dengan cara ini, masyarakat akan merasa lebih mudah dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan, karena informasi yang mereka dapatkan sudah bersifat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah gampong. Tetapi kami juga berupaya agar kedepannya dapat sepenuhnya memprioritaskan SIGAP sebagai media memberikan informasi kepada masyarakat. Agar data-data kita juga terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat dan penyediaannya juga sama dengan gampong-gampong lain⁶³.

Dalam hal ini, tentu masyarakat juga memiliki harapan untuk ke depannya terkait penyediaan informasi publik di gampong agar lebih memudahkan masyarakat. Sebagaimana pernyataan dari salah satu masyarakat Gampong Kuta Alam terkait harapan kedepan mengenai keterbukaan informasi publik di Kuta Alam, mengatakan:

Kami berharap informasi terkait Gampong, seperti data kependudukan, bantuan sosial, dan program pembangunan, bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kami ingin agar segala informasi yang dibutuhkan dapat tersedia dengan jelas dan transparan, seperti yang ada di website SIGAP gampong lain. Hal ini tentu akan mempermudah kami dalam menyamakan informasi yang kami dapatkan. Kami berharap ke depan, Gampong Kuta Alam bisa mengoptimalkan penggunaan website SIGAP⁶⁴.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIGAP di Gampong Kuta Alam, sebagai sarana transparansi informasi publik belum berjalan secara optimal. Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara langsung, akurat, dan transparan, kenyataannya Gampong Kuta Alam tidak memprioritaskan SIGAP sebagai media pelayan informasi publik.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, terdapat harapan besar agar ke depan Gampong Kuta Alam dapat mengoptimalkan penerapan SIGAP, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dan data terbaru tanpa harus terhambat. Hal

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri selaku Operator Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Fahrol selaku Masyarakat Gampong Kuta Alam, Bertempat di gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

ini akan mendukung transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong, dan memperkuat partisipasi dalam pembangunan gampong.

4.2.4.2 Pengarahan (Direction)

Penerapan SIGAP di Gampong bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi publik dengan memberikan pengarahan strategis kepada masyarakat dan perangkat gampong. Pengarahan yang diberikan di Gampong Kuta Alam terkait penerapan SIGAP saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara efektif. Keuchik Gampong Kuta Alam mengungkapkan bahwa meskipun SIGAP dirancang untuk meningkatkan transparansi informasi publik, gampong ini masih nyaman dengan website lama yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya dalam pengelolaan SIGAP.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong berkenaan dengan apakah Gampong Kuta Alam mendapatkan pengarahan dari DPMG Aceh terkait pengisian data di SIGAP, menyatakan bahwa:

Ya, Gampong Kuta Alam telah mendapatkan pengarahan dari DPMG Aceh terkait pengisian data di SIGAP. Namun, pelatihannya tidak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kami tidak lagi memprioritaskan web tersebut ⁶⁵.

Dilanjutkan dengan pernyataan Operator Gampong yang berkenaan terkait apakah Gampong Kuta Alam telah mengikuti pelatihan SIGAP yang diadakan oleh DPMG Aceh untuk mengelola SIGAP dengan baik, menyatakan bahwa,

Sayangnya, kami belum mengikuti pelatihan SIGAP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh. Yang mengikuti pelatihan tersebut operator yang bertugas sebelum saya, namun beliau tidak memberikan tatacara atau pengarahan terkait penggunaan website SIGAP. Saya sendiri tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara mengelola SIGAP dengan baik, sehingga sistem ini belum dapat digunakan dengan maksimal untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena yang saya pahami hanya website yang diberikan pemerintah Kota Banda Aceh, maka website yang kami gunakan untuk memberikan informasi publik ya website tersebut ⁶⁶.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadil selaku Sekretaris Desa Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri selaku Operator Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengarahan atau pelatihan terkait pengelolaan SIGAP tidak diberikan secara berkelanjutan. Dengan bergantinya perangkat yang bertugas, maka pengelolaan pun terhenti. Akibatnya SIGAP di gampong Kuta Alam tidak lagi dapat digunakan dengan maksimal untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dikarenakan data yang tersedia tidak diperbaharui secara berkala oleh perangkat gampong.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Operator Gampong berkenaan dengan apakah ada arahan lanjutan dari Keuchik Gampong Kuta Alam terkait implementasi SIGAP setelah pengarahan awal yang diberikan oleh DPMG Aceh, menyatakan bahwa:

Sebagai operator Gampong, saat ini tidak ada arahan lanjutan dari Keuchik terkait implementasi SIGAP setelah pengarahan awal yang diberikan oleh DPMG Aceh. Jadi, tidak ada instruksi atau pengarahan lebih lanjut dari Keuchik mengenai SIGAP⁶⁷.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan SIGAP di Gampong Kuta Alam bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi publik, namun implementasi dan pengarahan terkait SIGAP di gampong ini masih belum berjalan secara efektif. Sekretaris Gampong Kuta Alam menyatakan bahwa meskipun SIGAP dirancang untuk meningkatkan transparansi informasi, namun pelatihan yang dilaksanakan oleh DPMG Aceh belum maksimal karena tidak berkelanjutan, yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan kemampuan perangkat gampong dalam mengelola sistem ini.

4.2.4.3 Tindakan (action)

Tindakan yang diambil oleh pemerintah Gampong Kuta Alam dalam penerapan SIGAP saat ini terbatas pada pengelolaan informasi pada website yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Karena mereka tidak memprioritaskan dalam pengelolaan SIGAP, jadi tidak ada data dan informasi yang diperbaharui di platform SIGAP dengan baik. Hal ini menyebabkan website SIGAP di Gampong Kuta Alam tidak memuat data terbaru atau informasi yang relevan bagi masyarakat.

Sebagai tindakan pengganti, Gampong Kuta Alam melakukan pembaruan informasi secara manual di website yang sudah ada, meskipun ini tidak seefektif dan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri selaku Operator Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

secepat jika menggunakan SIGAP. Masyarakat tetap data dan informasi secara langsung dari pemerintah gampong di website tersebut. Keuchik berkomitmen untuk tetap menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat meskipun keterbukaan tersebut masih disampaikan dalam format yang berbeda. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa masyarakat tetap dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan meskipun SIGAP belum dioptimalkan.

Seperti yang dinyatakannya dalam wawancara mengenai rencana untuk meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi di Gampong Kuta Alam, meskipun SIGAP belum dioptimalkan, menyatakan:

Walaupun SIGAP belum memberikan informasi atau data yang terbaru seperti yang ada di gampong-gampong lain yang udah aktif SIGAP, kami tetap berusaha melakukan pembaruan informasi di website yang sudah ada, walaupun ini tidak seefektif SIGAP. Kami berkomitmen untuk tetap menjaga keterbukaan informasi meskipun dalam format yang berbeda ⁶⁸.

Langkah lainnya untuk menyampaikan informasi seperti memanfaatkan media sosial atau grup WhatsApp, untuk menyebarkan informasi yang mendesak yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan platform ini, diharapkan informasi dapat tersebar lebih cepat dan lebih luas kepada masyarakat Gampong Kuta Alam.

Dilanjutkan dengan pernyataan masyarakat Gampong yang berkenaan terkait apa harapan anda terkait penyediaan informasi Gampong untuk ke depannya, menyatakan bahwa:

Harapan saya terkait penerapan SIGAP untuk ke depannya adalah agar Gampong Kuta Alam dapat menerapkan sistem yang dapat dioptimalkan untuk penyediaan informasi secara lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perangkat gampong. Saya berharap, dengan adanya pelatihan dan pengarahan yang lebih mendalam, baik untuk perangkat gampong maupun masyarakat ⁶⁹.

Tindakan ini menunjukkan komitmen Gampong Kuta Alam untuk secara bertahap meningkatkan Transparansi Informasi Publik dan memastikan informasi yang dibutuhkan

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Heri selaku Operator Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Widya selaku Masyarakat Gampong Kuta Alam, Bertempat di Gampong Kuta Alam pada 09 Januari 2025.

masyarakat dapat diakses dengan lebih mudah dan transparan, meskipun saat ini mereka menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan terkait strategi penerapan sigap dalam peningkatan transparansi informasi publik di Gampong Kuta Alam, bahwa strategi penerapan SIGAP di Gampong Kuta Alam belum optimal. Gampong ini belum sepenuhnya memanfaatkan SIGAP untuk menyediakan informasi secara terbuka dan terbarukan, seperti data kependudukan, kebijakan, bantuan sosial, dan program pembangunan. Saat ini, masyarakat hanya mendapatkan informasi yang ditayangkan di website yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Pengarahan terkait SIGAP dari DPMG Aceh sudah diterima, namun pelaksanaannya belum efektif karena tidak dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dalam mengelola sistem SIGAP, sehingga informasi belum dapat diakses melalui platform digital dengan baik.

Sebagai langkah pengganti, Gampong Kuta Alam masih menyediakan informasi di website lama yang diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Masyarakat berharap sistem seperti SIGAP dapat dioptimalkan ke depannya agar informasi lebih mudah diakses dan transparansi tetap terjaga. Keuchik dan perangkat gampong juga berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi meskipun masih dalam format yang terbatas.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Perbandingan Penerapan SIGAP Dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik di Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam

Keterbukaan informasi pada gampong yang baik dikatakan jika gampong tersebut sudah memenuhi Indikator transparansi yang mencakup beberapa aspek kunci untuk mengukur sejauh mana informasi publik disediakan dan diakses oleh masyarakat. Transparansi informasi publik dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu Penyediaan Informasi yang Jelas, Kemudahan Akses Informasi dan Keterbukaan Dalam Proses Pelayanan Publik.

Hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi tentang penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam. Berdasarkan wawancara kepada informan dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, selanjutnya menganalisis bagaimana perbandingan penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Gampong Peunyerat dapat dikatakan telah berhasil dalam menerapkan prinsip keterbukaan atau transparansi informasi publik dengan cukup baik. Penerapan transparansi ini dapat diukur melalui indikator transparansi yang telah dianalisis dalam penelitian. Penyediaan informasi yang secara rutin diperbarui di website SIGAP oleh operator menunjukkan keberhasilan Gampong Peunyerat dalam peningkatan transparansi informasi publik. Dengan adanya pembaruan informasi yang teratur, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor desa untuk memperoleh data atau informasi yang mereka butuhkan. Hal ini tentu sangat memudahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kesibukan atau kesulitan dalam mengakses layanan secara langsung. Melalui pendekatan digital ini, Gampong Peunyerat berhasil menyediakan akses informasi yang cepat dan efisien bagi warganya.

Keberhasilan tersebut tentunya berimbas positif pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Gampong Peunyerat. Masyarakat merasa lebih dihargai dan lebih mudah dalam memperoleh informasi terkait kebijakan, program, serta perkembangan yang terjadi di gampong mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik sangat berperan dalam meningkatkan transparansi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gampong.

Namun, meskipun sudah ada keberhasilan dalam penerapan transparansi, Gampong Peunyerat tetap menghadapi tantangan, khususnya terkait dengan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan sebagian besar masyarakat. Banyak warga yang belum sepenuhnya familiar dengan penggunaan teknologi dan internet, yang menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan penggunaan platform SIGAP. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah gampong untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi yang telah disediakan.

Namun demikian, pemerintah Gampong Peunyerat tidak menutup mata terhadap masalah ini. Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah gampong

telah melaksanakan berbagai Langkah, seperti dengan melakukan sosialisasi terkait penggunaan sistem informasi digital yang bertujuan agar masyarakat lebih familiar dan mampu memanfaatkan teknologi dalam mengakses informasi publik. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah gampong dalam meningkatkan literasi digital di kalangan warganya, sehingga transparansi informasi publik dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Berbeda dengan Gampong Peunyerat, hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Kuta Alam menunjukkan bahwa penerapan SIGAP di gampong tersebut masih tergolong kurang baik. Penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah Gampong Kuta Alam tidak memprioritaskan SIGAP sebagai media utama dalam penerapan transparansi informasi publik. Namun sebagai gantinya, pemerintah Gampong Kuta Alam menggunakan website yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sebagai media penerapan transparansi informasi public. Berbeda dengan SIGAP, website dari pemerintah Kota Banda Aceh tidak menyediakan informasi yang efektif dan terintegrasi terutama informasi terkait kebijakan publik, program desa, serta perkembangan yang terjadi di gampong mereka. Selain itu, website tersebut tersebut juga harus di *input* secara manual oleh pengelola, tidak seperti SIGAP yang hanya perlu diperbaharui setiap data yang sudah ada. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pembaharuan data yang diberikan oleh pemerintah Gampong Kuta Alam.

Kurangnya prioritas di Gampong Kuta Alam menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kedua gampong dalam hal kualitas pelayanan publik. Masyarakat di Gampong Kuta Alam masih merasa kesulitan dalam mengakses data terbaru dari pemerintah gampong. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dan sistem informasi sudah ada, faktor keterlibatan aktif pemerintah gampong dalam mengelola dan menyebarkan informasi publik masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dari perbandingan antara kedua gampong tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi informasi publik sangat bergantung pada keseriusan pemerintah gampong dalam mengelola dan menyebarkan informasi yang relevan kepada masyarakat. Selain itu, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, terutama peran DPMG Aceh dalam memberikan pengarah yang berkelanjutan untuk setiap program yang telah di usulkan. Keberhasilan Gampong Peunyerat dalam menyediakan informasi publik yang transparan

menjadi contoh positif, sementara Gampong Kuta Alam masih perlu meningkatkan perhatian dan upaya dalam penerapan SIGAP. Penerapan transparansi yang lebih baik di Gampong Kuta Alam diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah gampong dan warganya.

Secara keseluruhan, meskipun Gampong Peunyerat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal transparansi informasi publik, tantangan terkait literasi digital tetap menjadi perhatian penting. Oleh karena itu, selain memperbaiki sistem penyampaian informasi, langkah-langkah untuk meningkatkan literasi digital juga harus menjadi prioritas, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari penerapan keterbukaan informasi yang lebih optimal.



BAB V

PENUTUP

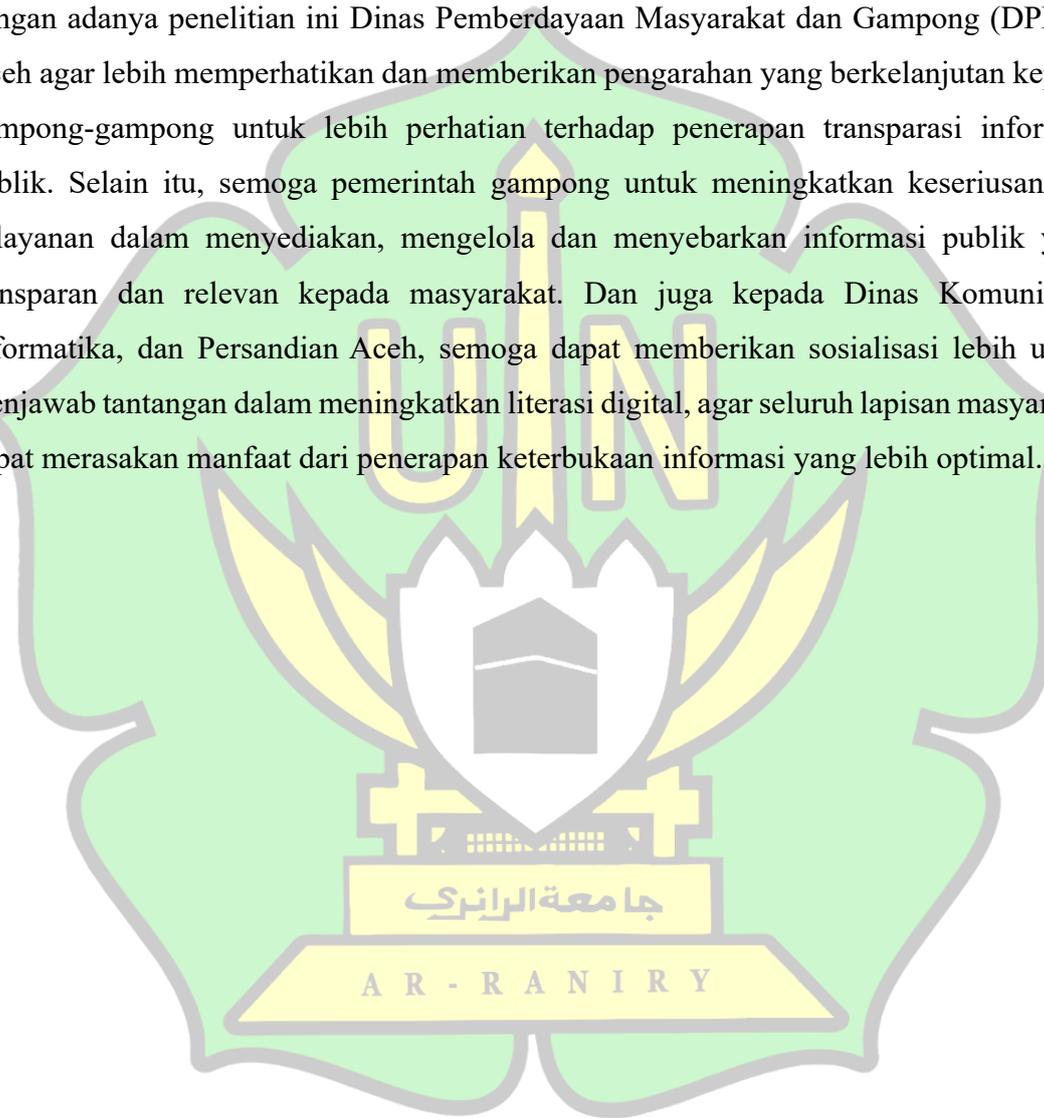
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Mekanisme penerapan SIGAP di Gampong Peunyeurat dapat dinilai lebih baik dan lebih efektif dalam peningkatan transparansi informasi publik dibandingkan dengan penerapan di Gampong Kuta Alam. Masyarakat Gampong Peunyeurat merasa lebih puas terhadap pelayanan dan keseriusan pemerintah gampong dalam mengelola dan menyebarkan informasi yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah dalam menjalankan program terkait penyebaran informasi publik masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. Strategi penerapan SIGAP yang melibatkan perangkat gampong dan lembaga lain di gampong peunyerat terkait yang secara aktif dalam pengelolaan data serta pemutakhiran informasi secara berkala terbukti sangat efektif. Gampong ini berhasil menyediakan akses informasi yang transparan kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam hal kemudahan akses informasi. Sebaliknya, Gampong Kuta Alam sudah tergolong aktif dalam penerapan transparansi informasi publik. Namun dalam hal ini, Gampong Kuta Alam masih mengandalkan website lama dalam pendataan dan penyebaran informasi. Hal ini menyebabkan informasi yang seharusnya mudah dikelola oleh perangkat dan mudah dikelola, bahkan menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat, karena belum ada adanya pemahaman yang maksimal kepada perangkat gampong yang harusnya sebagai pengelola website SIGAP.

5.2 Saran

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, terutama bagi penulis dan juga bagi *stakeholder* yang terlibat dalam penerapan SIGAP ini seperti Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, dan Pemerintah Gampong. Semoga dengan adanya penelitian ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh agar lebih memperhatikan dan memberikan pengarahannya yang berkelanjutan kepada gampong-gampong untuk lebih perhatian terhadap penerapan transparansi informasi publik. Selain itu, semoga pemerintah gampong untuk meningkatkan keseriusan dan pelayanan dalam menyediakan, mengelola dan menyebarkan informasi publik yang transparan dan relevan kepada masyarakat. Dan juga kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, semoga dapat memberikan sosialisasi lebih untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan literasi digital, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari penerapan keterbukaan informasi yang lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2021, Tentang SIGAP

Undang-Undang Desa Pasal 86 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa

Jurnal:

Panda. "Pelibatan Pemerintah Dalam Implementasi Sistem Informasi Desa." (2023).

Rifki Agung Kusuma Putra. "Data Dan Sistem Informasi Desa Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* (2021)

Rumimpunu, Sofany Russo, Johny R E Tampi, and Very Y Londa. "Implementation Of E-Government In Support Of Transparency And Public Disclosure (Case Study In Official Website Of Government Of Manado City)." (2021)

Subino Hadi Subroto. "Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data Dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif." 1999 (Bandung: hlm.17.)

Sucipto, Adi, Jupriyadi Jupriyadi, Andi Nurkholis, Arief Budiman, Donaya Pasha, Gusti Firmansyah, and Zahra Kharisma Sangha. "Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari." *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, (2022)

Wurara, Citta Nadya Celine, Alfon Kimbal, and Neni Kumayas. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* (2020).

Fitri, Lucky Enggraini, Dedy Setiawan, Pradita Eko Prasetyo Utomo, and Sylvia Kartika Wulan Bhayangkari. "Penerapan Sistem Informasi Desa Berbasis Tik Di Desa Nyogan Menuju Tata Kelola Good Governance Dan Kemandirian Desa." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, (2021)

Hertati, Diana. "Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, (2020).

Darsiswanti, D Y. "Studi Komparatif Analisis Community Based Tourism Antara Desa Karangrejo Dan Desa Karanganyar Sebagai Desa Wisata " *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, (2022).

Ismaulidina, Isma, Effiati Juliana Hasibuan, and Taufik Wal Hidayat Wal Hidayat.

“Strategi Komunikasi Public Relation Dalam Membangun Citra Dan Kepercayaan Calon Jemaah Haji Dan Umroh.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, (2020)

Karimullah, Ach., Redy Rifky Maulany, and Muhammad Amiruddin. “Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia.” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, (2022)

Nengsih, W., Adnan, F., & Eriyanti, F. “Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang.” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, (2019).

Parwita, Wayan Gede Suka, Rizkita Ayu Mutiarani, and I Nyoman Widhi Adnyana. “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kependudukan Berbasis Web Di Desa Kukuh Kerambitan.” *Jurnal Widya Laksana*, (2021)

Rozi, Fahrur, Tomi Listiawan, and Yusuf Hasyim. “Pengembangan Website Dan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Tulungagung.” *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, (2017)

Timpal, Erlene T.V., Agustinus B. Pati, and Fanley Pangemanan. “Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa Di Bidang Teknologi Informasi Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Governance*, (2021)

Website:

KSDATTG, Bidang. “Pemerintah Aceh Akan Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Gampong.” DPMG ACEH, 2021.

Dawaty, Syafni. “Data Primer.” Websiter Universitas Raharja, 2020.

DPMG. “Sistem Informasi Gampong (SIGAP).” Pemerintah Aceh, 2021.

Buku:

Sugiyono. “Metode Penelitian Pendidikan.” Bandung: 2010.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D ” (Bandung: Alfabeta, 2017). Hal 145.

Azis, Yusuf Abdhul. “Metode Observasi.”, 2022.

Tachjan. “Implementasi Kebijakan Publik.” Bandung, 2006.

Edward, George C. III 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Joko Pramono, “Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik, 2020.

Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana; Jakarta, 2017.

Zuchri Abdussamad. “Metode Penelitian Kualitatif.” Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Solihin, Endang. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*, 2021.

Suetanyo. *Pendekatan Kualitatif*, 2012.

Sukirman. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan : Penerbit Aksara Timur, hlm. 06, 2021.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Pertanyaan Penelitian

| No | INFORMAN | PERTANYAAN |
|----|---|--|
| 1 | Keuchik Gampong Peunyeurat dan Kuta Alam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja langkah yang telah dilakukan dalam menerapkan SIGAP? 2. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penerapan SIGAP? 3. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan SIGAP? 4. Apakah SIGAP sudah memenuhi harapan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik? 5. Apa rencana pengembangan SIGAP di masa depan? 6. Apakah Gampong memiliki kebijakan atau SOP khusus terkait pengelolaan informasi 7. Apakah ada pengarahannya dari DPMG terkait pengoperasian SIGAP di Gampong? |
| 2 | Sekretaris Gampong Peunyeurat dan Kuta Alam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran sekretaris gampong dalam pengelolaan SIGAP? 2. Apa strategi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang SIGAP? 3. Bagaimana memastikan keakuratan data SIGAP? 4. Apakah dalam mengimplementasikan SIGAP memiliki hambatan? 5. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut? |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | Operator Gampong Peunyeurat dan Kuta Alam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara mengumpulkan dan memperbarui data SIGAP? 2. Data apa saja yang tersedia di SIGAP dan harus selalu diperbarui? 3. Apa strategi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang SIGAP? 4. Bagaimana memastikan keakuratan data SIGAP? 5. Apakah selama mengoperasikan SIGAP terdapat kendala teknis? 6. Bagaimana mengatasinya? |
| 3 | Masyarakat Gampong Peunyeurat dan Kuta Alam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda mengetahui tentang SIGAP yang diterapkan di Gampong Peunyerat/Geuceu Iniem? 2. Apakah informasi yang disampaikan melalui SIGAP sudah jelas dan mudah dipahami? 3. Apakah masyarakat dapat mengakses SIGAP? 4. Bagaimana masyarakat mendapat informasi publik? 5. Apakah anda puas dengan informasi yang disediakan? 6. Apa harapan anda terkait penerapan SIGAP untuk ke depannya? |

Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1985/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Oktober 2024**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Dr. Saïd Amirul Kamar, M.M., M. Si** Sebagai pembimbing I
2. **Zakki Fuad Khalil, S.IP., M. Si** Sebagai pembimbing II
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : **Nabila Febridha**
- NIM : **210802035**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
- Judul : **Studi Komparasi Penerapan SIGAP dalam Peningkatan Transparansi Informasi Publik di Gampong Peunyeurat dan Gampong Kuta Alam Kota Banda Aceh**
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 15 Oktober 2024
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jalan Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon: 0651-7552921, 7551857; Fax. 0651-7552922
 Website: www.fisip.uin-ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2508/Un.08/FISIP/PP.00.9/12/2024 30 Desember 2024
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Surat Izin Penelitian Mahasiswa

Yth. 1. Kantor Keuchik Gampong Peunyeurat
 2. Kantor Keuchik Gampong Geuceu Ineim

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu kami mohon izin mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini untuk melakukan penelitian dan pengambilan data, adapun nama mahasiswa tersebut sebagai berikut:

Nama : Nabila Febridha
 Nim : 210802035
 Prodi/Semester : Ilmu Administrasi Negara / VII
 No.Hp : 085261349096
 Alamat : Desa Langeu-Eu, Peukan Bada , Aceh Besar
 Judul Skripsi : Studi Komparasi Penerapan SIGAP dalam Peningkatan
 Transparansi Informasi Publik di Gampong Peunyeurat dan
 Gampong Geuceu Ineim Kecamatan Banda Raya Kota Banda
 Aceh
 Pembimbing I : Dr. Said Amirul Kamar , M.M., M.S.Si

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Dekan

Muji Mulia

Energi Kebangsaan Sinergi Membangun Negeri



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Gampong Peunyeurat



Gampong Kuta Alam



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Nabilla Febridha
Tempat/ Tanggal Lahir : Sigli, 11 Februari 2003
Nomor Handphone : 085261349096
Alamat : Desa Lamgeu-Eu, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar
Email : 210802035@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 50 Banda Aceh
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 3 Banda Aceh
Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 1 Banda Aceh

Sertifikasi

Ma'had Jami'ah : 86 | 2023 | Ma'had Al-Jami'ah
TOAFL : 400 | 2025 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer : A- | 2025 | ICT UIN Ar-Raniry
Magang : 97,4 | 2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

Banda Aceh, 17 Januari 2025

Nabilla Febridha
210802035